

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN 2015 - 2019



DINAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN
KOTA PONTIANAK
Jl. Budi Utomo No. 29 Pontianak (78421)



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 698.1 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 harus disahkan oleh Walikota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Pengesahan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2015-2019 perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional Tahun 2010-2014;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);

32. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
34. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk menetapkan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak berdasarkan Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Oktober 2014



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 698.1/DPPK/TAHUN 2014

TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA PONTIANAK
TAHUN 2015-2019



KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KOTA PONTIANAK

NOMOR 396 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN
KEHUTANAN KOTA PONTIANAK TAHUN 2015-2019

KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 harus disahkan oleh Walikota Pontianak;
 - c. bahwa dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan telah disahkan oleh Walikota Pontianak melalui Keputusan Walikota Nomor 698.1 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2015-2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas mengenai Pengesahan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2015-2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Nasional Tahun 2010-2014;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
34. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 129);
35. Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 698.1 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2015-2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Oktober 2014

KEPALA DINAS PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN KOTA PONTIANAK,



Tembusan: Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak ini dapat dirumuskan dan diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis ini mempunyai tujuan panjang untuk meningkatkan kemampuan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*, melalui perubahan pola pikir, membangkitkan kesadaran dan komitmen bersama untuk melakukan pembangunan, khususnya pembangunan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan di wilayah Kota Pontianak.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dipandang perlu untuk menetapkan/menyusun Rencana Kerja Strategis (RENSTRA) tahun 2015-2019 yang merupakan acuan dan tolak ukur utama bagi berbagai pihak dalam melakukan pembinaan dan pembangunan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan di Kota Pontianak dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi pembangunan Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Pontianak tahun 2015-2019.

Kepada semua pihak yang telah ikut memberikan sumbang saran dan pemikiran demi penyempurnaan RENSTRA ini kami ucapkan terima kasih.

Pontianak, Mei 2014
Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Kota Pontianak

Ir. Hidayati
Pembina Utama Muda
NIP.19650526 199103 2 008



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-5
II. GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA PONTIANAK	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.....	II-1
2.2 Sumber Daya SKPD.....	II-12
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD.....	II-14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	II-44
III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	III-2
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.....	III-3
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	III-11
IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi	IV-1
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	IV-2
4.3 Strategi dan Kebijakan.....	IV-9
V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	V-1
VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	VI-1
VII. PENUTUP	VII-1
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
II.1	Daftar Sumberdaya Manusia Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Berdasarkan Golongan Ruang Pangkat	II-12
II.2	Daftar Pejabat Struktural pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak	II-12
II.3	Daftar Sumberdaya Manusia Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Menurut Tingkat Pendidikan	II-12
II.4	Target Anggaran Program Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Tahun 2010-2014	II-15
II.5	Realisasi Anggaran Program Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2010-2014	II-16
II.6	Capaian Kinerja Sasaran Pertama Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2010-2014.....	II-17
II.7	Produksi Tanaman Hortikultura pada Setiap Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2010-2013.....	II-18
II.8	Populasi Ternak Penghasil Daging pada Tahun 2010-2014 di Kota Pontianak.....	II-19
II.9	Rekapitulasi Produksi Daging dan Telur pada Tahun 2010-2014 di Kota Pontianak.....	II-19
II-10	Realisasi Kinerja Program Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Urusan Pertanian Tahun 2010-2014	II-20
II-11	Capaian Kinerja Sasaran Kedua Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2010-2014	II-30
II-12	Produksi Ikan Hasil Budidaya dalam Kolam/Bak/Petakan dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Kota Pontianak Tahun 2010-2014.....	II-30
II-13	Realisasi Kinerja Program Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014.....	II-31
II-14	Capaian Kinerja Sasaran Ketiga Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2010-2014.....	II-38
II-15	Lokasi Kawasan Hutan Kota di Pontianak Tahun 2010-2014.....	II-38
II-16	Realisasi Kinerja Program Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Urusan Kehutanan Tahun 2010-2014.....	II-39
II-17	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2010-2014.....	II-42
II-18	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2010-2013	II-43
III.1	Matriks Analisa SWOT.....	III-16
IV.1	Keterkaitan (Interelasi) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak.....	IV-6
V.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.....	V-16
VI.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak.....	VI-5



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak..	I-11



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Keterkaitan (Interelasi) Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Serta Target Kinerja Indikator Sasaran (Dalam Angka) Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak.....	VIII-1
2	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak.....	VIII-5

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran ini digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan capital; penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, penyerap tenaga kerja; sumber pendapatan; serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Tujuan pembangunan perekonomian tersebut dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian seperti meningkatnya jumlah penduduk; tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar; pesatnya kemajuan teknologi dan informasi; makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi; perubahan iklim global; perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat; kecilnya status dan luas kepemilikan lahan; masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan; masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh; masih rawannya ketahanan pangan dan energi; masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian sehingga pembangunan pertanian ke depan menghadapi banyak tantangan.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan, mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai setiap kegiatan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal, dan pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada. Rencana strategis juga merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi operasional dan prioritas-prioritas.

Rencana strategis SKPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah untuk setiap unit kerja daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja agar dapat eksis dan unggul dalam persaingan yang makin ketat dalam lingkungan yang selalu berubah sangat cepat seperti dewasa

ini, maka Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Pontianak menyusun Renstra SKPD yang memuat strategi-strategi pembangunan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan di wilayah Kota Pontianak sebagai penjabaran RPJM yang telah ditetapkan sebelumnya. Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2015-2019 berisikan visi, misi, dan nilai-nilai instansi, lingkungan strategis, dan faktor-faktor penentu keberhasilan, serta tujuan, sasaran, dan cara mencapainya, yang diharapkan dapat memberikan pedoman, arah, dan tujuan yang jelas untuk masa lima tahun mendatang. Renstra ini disusun berdasarkan program dan kegiatan yang terencana, terukur, dan diharapkan dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat (*stakeholders*).

Renstra Dinas ini secara umum memiliki tujuan memberikan arah, pedoman yang terencana dalam mengarahkan seluruh potensi sumber daya manusia dan potensi lain yang dimiliki dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Strategi yang mampu menjawab kemajuan, perkembangan dan tantangan jaman. Sedangkan secara khusus dirumuskan untuk memberikan gambaran potensi riil yang dimiliki, melalui faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan; menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa lima tahun mendatang; memprediksi hambatan-hambatan yang terjadi dan sekaligus mencari jalan keluar (solusi); serta memberikan arah dalam upaya menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pihak.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak sangat penting tidak hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi masyarakat dan pelaku agribisnis pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan di wilayah Kota Pontianak, maka penyusunan Renstra SKPD Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (RENJA) Dinas.



1.2 Landasan hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Renstra Dinas ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- t. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);

- u. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
- v. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9);
- w. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak 2015-2019 ini adalah sebagai acuan bagi dinas dalam merencanakan dan mengembangkan langkah-langkah strategi guna meningkatkan tugas pokok dan fungsi Dinas, sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, sedangkan tujuannya adalah:

1. menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi aparat pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait sebagai bahan rujukan pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan agar lebih terarah dan menjamin terwujudnya Visi dan Misi Kota Pontianak dalam kurun waktu pembangunan 5 tahun (2015 – 2019);
2. menjamin konsistensi dan komitmen perencanaan dan pemilihan program/kegiatan yang disepakati seluruh pemangku kepentingan dan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah;
3. sebagai alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Pontianak ini disusun dengan berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta Surat Edaran Menteri dalam Negeri. Adapun secara rinci sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA PONTIANAK

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP

Lampiran



2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak merupakan suatu institusi atau kelembagaan yang ada pada Pemerintah Kota Pontianak hingga tahun 2008 dikenal dengan nama Dinas Urusan Pangan. Perubahan nama dan struktur organisasi ini diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak, yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu pada Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Pontianak secara umum mempunyai tugas membantu Walikota dalam mewujudkan misi pembangunan perekonomian di wilayah Kota Pontianak di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Secara rinci fungsi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan rencana kerja di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- c. Pelaksanaan pengendalian dan pembinaan teknis di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- d. Penyelenggaraan perizinan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- e. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- f. Pelaksanaan tugas lain di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan yang diberikan oleh Walikota.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Tugas pokok Kepala Dinas adalah merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas memiliki fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- Perumusan rencana kerja di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- Pengendalian dan pembinaan teknis di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- Penyelenggaraan perizinan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan yang diberikan oleh Walikota

2. Sekretaris Dinas

Tugas pokok Sekretaris Dinas adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

Adapun fungsi Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan;
- Perumusan rencana kerja di bidang kesekretariatan;
- Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
- Monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan;
- Pembinaan teknis di bidang kesekretariatan;
- Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
- Pengelolaan administrasi di bidang kesekretariatan;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup bidang kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan. Secara rinci tugas dan fungsi ketiga bidang tersebut akan diuraikan berikut ini.

a) Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Kasubbag Umum dan Kepegawaian memiliki tugas pokok untuk mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan, dan menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasubbag Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang umum dan kepegawaian;
- Penyusunan rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian;
- Penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian;

- Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Ruang lingkup subbagian umum dan kepegawaian meliputi administrasi surat menyurat, fasilitasi pertemuan/ rapat, urusan perlengkapan dan rumah tangga Dinas pelayanan data dan informasi serta pelayanan administrasi kepegawaian internal.

b) Kasubbag Perencanaan

Tugas pokok Kepala Subbagian Perencanaan adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang telah diuraikan di atas, Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi:

- Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan;
- Penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan;
- Penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Ruang lingkup subbagian perencanaan meliputi penyusunan bahan koordinasi kegiatan internal, pembinaan rencana program/ kegiatan, pelaporan satuan kerja, penyusunan rencana kebutuhan rencana penataan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat daerah, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengolahan pengaduan masyarakat.

c) Kasubbag Keuangan

Tugas pokok Kepala Subbagian Keuangan adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kegiatan, dan menyusun laporan di bidang keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:

- Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan;
- Penyusunan rencana kerja di bidang keuangan;
- Penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang keuangan;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Ruang Lingkup Subbagian Keuangan meliputi pelaksanaan administrasi keuangan, pelaporan keuangan, administrasi penerimaan/ pendapatan, administrasi penganggaran, dan pembinaan teknis terhadap fungsional keuangan.

3. Kepala Bidang Pertanian dan Kehutanan

Tugas pokok Kepala Bidang Pertanian dan Kehutanan adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang pertanian dan kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pertanian dan kehutanan;
- Penyusunan rencana kerja di bidang pertanian dan kehutanan;
- Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pertanian dan kehutanan;
- Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang pertanian dan kehutanan;
- Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan kehutanan;
- Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan kehutanan;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang pertanian dan kehutanan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup bidang pertanian dan kehutanan meliputi tanaman pangan dan hortikultura, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta kehutanan.

a) Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tugas pokok Kepala seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Untuk melaksanakan tugas pokok nya, Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- Pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- Pengelolaan dan penyusunan rencana kerja di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- Penyelenggaraan kegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- Pengelolaan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang tanaman pangan dan hortikultura yang diberikan oleh kepala bidang.

Ruang lingkup seksi tanaman pangan dan hortikultura meliputi: 1) pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan; 2) penyediaan sarana dan

prasarana; 3) pengembangan komoditas unggulan, 4) pelayanan rekomendasi perizinan; 5) peningkatan mutu hasil; 6) penanganan pascapanen; 7) bimbingan kelembagaan usaha tani; 8) penerapan teknologi hasil penelitian dan pengembangan spesifik lokasi; 9) penerapan standarisasi dan sertifikasi produk; 10) pengawasan dan pengendalian uji hasil produk; serta 11) penyusunan statistik tanaman pangan.

b) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Tugas pokok Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Adapun fungsi Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dalam rangka pelaksanaan tugas pokok yang telah diuraikan di atas adalah:

- Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- Pengolahan dan penyusunan rencana kerja di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- Penyelenggaraan kegiatan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- Pengolahan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Ruang lingkup seksi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian meliputi: 1) pembinaan usaha pengolahan hasil pertanian; 2) bimbingan pemasaran; 3) pelayanan rekomendasi perizinan; 4) standarisasi dan sertifikasi produk olahan; dan 5) statistik usaha pengolahan hasil pertanian.

c) Kepala Seksi Kehutanan

Tugas pokok Kepala seksi Kehutanan adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi Kepala Seksi Kehutanan adalah:

- Pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
- Pengelolaan dan penyusunan rencana kerja di bidang kehutanan;
- Penyelenggaraan kegiatan di bidang kehutanan;
- Pengelolaan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kehutanan;

- Pelaksanaan tugas lain di bidang kehutanan yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- Ruang lingkup seksi kehutanan meliputi: 1) pengendalian lahan; 2) kelembagaan usaha kehutanan dan perkebunan; 3) penanganan panen dan pascapanen; 4) penyediaan sarana prasarana; 5) pengembangan komoditas unggulan; 6) pengembangan teknologi spesifik lokasi; 7) pelayanan rekomendasi perizinan; 8) standardisasi dan sertifikasi produk usaha kehutanan dan perkebunan; 9) statistik kehutanan dan perkebunan; 10) penegakan regulasi, penertiban, dan fasilitasi penyediaan bahan baku industri; 11) pengujian hasil hutan; 12) pelayanan rekomendasi perizinan; 13) penatausahaan hasil hutan; serta 14) pemasaran hasil hutan dan kebun.

4. Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan

Tugas pokok Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan adalah menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang perikanan dan peternakan.

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud di atas, Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang perikanan dan peternakan;
- Penyusunan rencana kerja di bidang perikanan dan peternakan;
- Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang perikanan dan peternakan;
- Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di bidang perikanan dan peternakan;
- Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perikanan dan peternakan;
- Penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perikanan dan peternakan;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang perikanan dan peternakan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Ruang lingkup bidang perikanan dan peternakan meliputi perikanan budidaya dan tangkap, pengawasan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan, pengembangan usaha dan sarana prasarana peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet (kesehatan masyarakat veteriner).

a) Kepala Seksi Perikanan

Tugas pokok Kepala Seksi Perikanan adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perikanan.

Fungsi Kepala Seksi Perikanan agar dapat melaksanakan tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
- Pengelolaan dan penyusunan rencana kerja di bidang perikanan;
- Penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan;

- Pengelolaan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perikanan;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang perikanan yang diberikan oleh kepala bidang.

Ruang lingkup seksi perikanan meliputi: 1) seleksi, informasi, dan sertifikasi mutu benih; 2) pengawasan bahan kimia dan residu; 3) penyediaan bibit; 4) pendataan komoditas dan pemetaan potensi budidaya; 5) penyediaan sarana prasarana budidaya; 6) rekomendasi ekspor impor benih, perikanan budidaya, dan pemasaran hasil budidaya perikanan; 7) konservasi dan rehabilitasi sumberdaya perairan; 8) pengawasan produksi dan kesehatan ikan budidaya; 9) teknologi, higienitas dan sanitasi lingkungan; 10) pengembangan kemitraan; 11) pendataan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya dan tangkap; 12) pungutan perikanan; 13) pembinaan, koordinasi, penetapan/ pelelangan ikan; 14) pengelolaan sarana dan prasarana perikanan Budidaya dan tangkap; 15) pengawasan plasma nuftah perikanan, perbenihan, lembaga sertifikasi, mutu benih dan induk, pakan, obat dan bahan bakunya, serta pengendalian hama dan penyakit; 16) pengawasan peredaran bahan pangan hasil perikanan dan residu antibiotic, serta cemaran mikroba di perairan; 17) pengembangan kelembagaan petani dan usaha petani perikanan; 18) informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 19) penerapan teknologi; 20) bimbingan mutu; serta 21) promosi dan pemasaran.

b) Kepala Seksi Peternakan

Tugas pokok Kepala Seksi Peternakan adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang peternakan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Kepala seksi Peternakan memiliki beberapa fungsi, yakni:

- Pengolahan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan;
- Pengelolaan dan penyusunan rencana kerja di bidang peternakan;
- Penyelenggaraan kegiatan di bidang peternakan;
- Pengelolaan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang peternakan;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan;
- Pelaksanaan tugas lain di bidang peternakan yang diberikan oleh Kepala Bidang

Ruang lingkup Seksi Peternakan meliputi: 1) penetapan dan pengawasan kawasan peternakan; 2) pengembangan lahan hijauan makanan ternak; 3) pemenuhan dan pelayanan alat dan mesin peternakan; 4) pengembangan teknologi tepat guna peternakan; 5) kerja sama antara lembaga teknologi peternakan; 6) kesehatan hewan

dan masyarakat veteriner; 7) pemanfaatan dan optimalisasi pengelolaan air usaha peternakan; 8) pengelolaan kegiatan inseminasi buatan; 9) pemberian rekomendasi teknis izin usaha peternakan, pemasukan dan pengeluaran ternak, kemitraan swasta dan promosi peternakan; 10) pelaksanaan UKL/UPL peternakan; 11) fasilitasi pembiayaan usaha peternakan; 12) distribusi dan pengawasan ternak dan bibit ternak; 13) penanganan panen, pascapanen dan pengolahan hasil peternakan; 14) pemasaran hasil peternakan; 15) pengelolaan data dan statistik peternakan; 16) pengawasan pakan, bahan baku pakan ternak, lalu lintas hewan dan hasil olahannya, produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), pemantauan dan pengendalian penyakit hewan serta penertiban obat hewan, pemotongan hewan, pemantauan dan pengendalian penyakit zoonosis, serta peredaran produk pangan asal hewan; 17) kerjasama karantina hewan; 18) pengadaan dan pengolahan alat-alat dan obat kesehatan hewan; 19) penerapan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan; 20) penerapan hygiene-sanitasi unit usaha produk asal hewan; 21) penerapan standard teknis Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU), penerapan standard teknis dan pelayanan pemeriksaan Laboratorium Kesmavet; serta 22) Pengawasan dan penertiban, pemberian rekomendasi pemasukan produk asal hewan.

5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 65 tahun 2008 pasal 38 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Pontianak yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah disebutkan di atas, UPTD Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Pontianak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan kegiatan UPTD di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- Pelaksanaan kegiatan UPTD di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- Pelaksanaan pelayanan UPTD di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- Pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan;
- Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas

Dalam pelaksanaannya, UPTD di wilayah kerja Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Pontianak dibagi menjadi tiga unit yakni UPTD Agribisnis, UPTD RPH Babi, UPTD RPH Sapi dan UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Tugas pokok dan fungsi masing-masing UPTD secara berurutan diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 76, 77, dan 78 Tahun 2008. Pada tahun 2012 Peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2008 tentang UPTD RPH Babi dicabut, sehingga terhitung mulai tanggal 1 November 2012,

keberadaan kelembagaan UPTD RPH Babi dihapuskan dan berada di bawah Seksi Perikanan. Kemudian pada tahun yang sama, dibentuk UPTD baru, yaitu UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2012. Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing UPTD adalah sebagai berikut :

a) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Agribisnis



UPTD Agribisnis adalah unsur pelaksana teknis Dinas di bidang pertanian. Tugas pokok Kepala UPTD Agribisnis Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Pontianak adalah melaksanakan kebijakan teknis di bidang agribisnis yang ruang lingkup kerjanya meliputi pembinaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan, pengelolaan terminal agribisnis, pengembangan lidah buaya (Aloe Vera Center), pengembangan anggrek (Orchid Center), penangkaran dan pemasaran ikan hias dan ikan konsumsi.

b) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah RPH Sapi

UPTD RPH Sapi adalah unsur pelaksana teknis di bidang pemotongan hewan sapi. UPTD ini dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat. Tugas



pokok Kepala UPTD RPH sapi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2008 adalah melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemotongan hewan sapi. Ruang lingkup pekerjaan Teknis UPTD meliputi pembinaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan, pemeriksaan kesehatan antemortem dan postmortem, pelayanan pemotongan hewan sapi untuk menghasilkan daging sapi konsumsi yang aman, sehat, utuh, dan halal, pencegahan penyebaran penyakit hewan menular, pemungutan retribusi, pengelolaan limbah hasil pemotongan untuk mencegah pencemaran lingkungan sekitar RPH.

c) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pangkalan Pendaratan Ikan



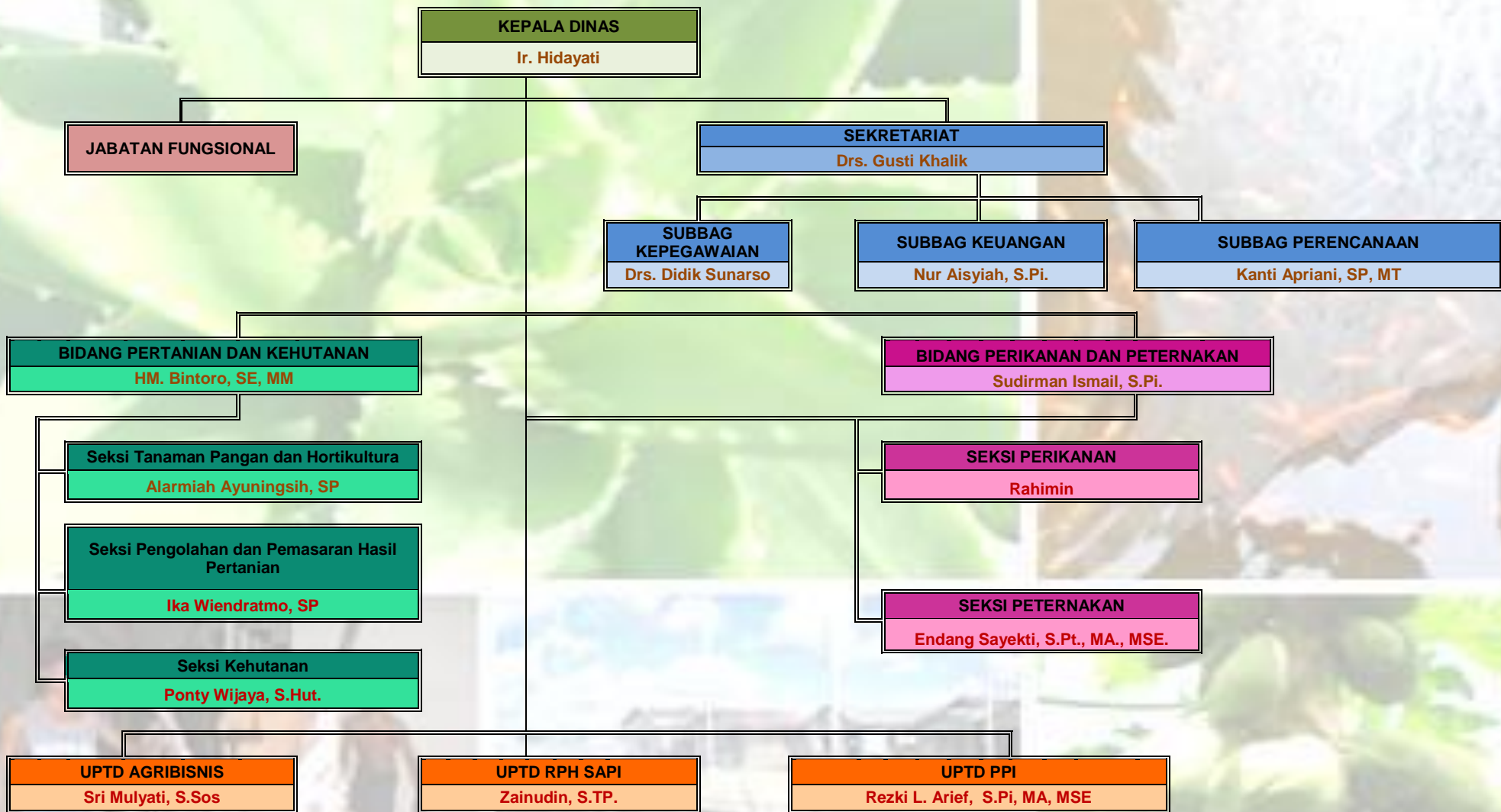
UPTD PPI ini merupakan UPTD yang baru resmi dibentuk pada tanggal 1 November 2012 sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2012. UPTD PPI adalah unsur pelaksana teknis di bidang perikanan sebagai tempat berlabuh atau bertambatnya kapal perikanan tangkap guna mendaratkan ikan, memuat perbekalan kapal dan awak kapal, sebagai pusat kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pembinaan masyarakat nelayan. UPTD ini dipimpin oleh seorang

Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara administratif berkoordinasi dengan Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat di wilayah kerjanya. Tugas pokok Kepala UPTD PPI berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Nomor 01 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas PPI Sei. Jawi Kota Pontianak adalah menyelenggarakan pekerjaan teknis dan operasional Dinas di bidang pengelolaan pangkalan pendaratan ikan (PPI). Ruang lingkup pekerjaan teknis UPTD meliputi pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan, bongkar muat ikan, pengolahan hasil perikanan, kesyaahbandaran perikanan, pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan, fasilitas kelancaran kegiatan operasional kapal perikanan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan, publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan, kegiatan publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan, kegiatan pemasaran dan distribusi ikan, pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan dan pembinaan mutu, pengolahan hasil perikanan dan masyarakat nelayan serta penyediaan dan/ atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 65 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak, susunan organisasi pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Pertanian dan Kehutanan
 - a. Kepala Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - b. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
 - c. Kepala Seksi Kehutanan
4. Kepala Bidang Perikanan dan Peternakan
 - a. Kepala Seksi Perikanan
 - b. Kepala Seksi Peternakan
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah
6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Secara rinci struktur organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kota Pontianak dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak

2.2. Sumber Daya SKPD

1. Sumberdaya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia di Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak terdiri dari PNS sebanyak 50 (lima puluh) orang dan petugas honor harian sebanyak 40 (empat puluh) orang. Secara rinci jumlah PNS berdasarkan golongan/ ruang pangkat dapat dilihat pada Tabel berikut ini

Tabel II.1. Daftar Sumberdaya Manusia Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Berdasarkan Golongan Ruang Pangkat

No	Golongan/Ruang Pangkat	Jumlah (orang)
1.	IV (Empat)	4
2.	III (Tiga)	38
3.	II (Dua)	6
4.	I (satu)	2
	Jumlah	50

Tabel II.2. Daftar Pejabat Struktural Pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak

No	Eselon/Non Eselon	Jumlah (orang)
1.	II (Dua)	1
2.	III (Tiga)	3
3.	IV (Empat)	14
4.	Noneselon	32
	Jumlah	50

Tabel II.3. Daftar Sumberdaya Manusia Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Menurut Tingkat Pendidikan

No	Golongan/Ruang Pangkat	Jumlah (orang)
1.	Strata III	-
2.	Strata II	5
3.	Strata I	33
4.	Diploma	-
5.	SLTA/Sederajat	10
6.	SLTP/Sederajat	1
7.	SD	1
	Jumlah	50

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana memegang peranan yang cukup penting dalam membantu aparatur untuk mencapai sasaran Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu instansi harus di registrasikan menurut kode, jenis, jumlah dan kondisi saat ini ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) menurut Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah sebagai berikut :

a) KIB A Tanah

Tanah yang merupakan salah satu aset Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak. Banyaknya jumlah kepemilikan tanah oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak berdasarkan jumlah UPTD dan unit kerja yang dibawahinya sebanyak 16 buah. Tentunya kepemilikan tanah ini juga disertai dengan kelengkapan berkas berupa sertifikat kepemilikan, kondisi diatas tanah tersebut saat ini telah berdiri gedung dan bangunan milik Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak.

b) KIB B Mesin dan peralatan



Jumlah mesin dan peralatan sesuai KIB B pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak berjumlah 1.557 buah, memiliki asal usul cara perolehan dengan pembelian sesuai dengan standar harga yang berlaku saat itu dan diikuti dengan spesifikasi bahan serta ukuran sesuai kebutuhan. Selain sebagai sarana dalam melaksanakan tugas administrasi keseharian seperti komputer, printer, meja, kursi dan juga mesin dan peralatan pertanian, termasuk didalamnya adalah peralatan laboratorium kultur jaringan dan laboratorium powder yang berada dibawah UPTD Agribisnis Aloe Vera Center. Kondisi mesin dan peralatan yang didaftarkan kedalam KIB B masih dalam kondisi baik.

c) KIB C Gedung dan bangunan

Sarana dan prasarana yang ikut memiliki peranan penting adalah gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan yang berdiri ini tentunya memiliki spesifikasi konstruksi tertentu yaitu seperti bertingkat atau tidak dan menggunakan beton atau tidak. Gedung dan bangunan yang terdaftar sesuai dengan KIB C berjumlah 206 buah, 2 diantaranya dalam kondisi Kurang Baik yaitu gedung kantor permanen berlokasi di jalan Ahmad Yani Kelurahan Parit Tokaya sedangkan 204 gedung dan bangunan masih dalam kondisi Baik.

d) KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan

Salah satu sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi pokok Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah jalan, irigasi dan jaringan. Dalam hal ini sarana inilah yang memfasilitasi pelaksanaan tugas sehari-hari, seperti jalan yang berfungsi sebagai penghubungan antar tujuan, irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan air sesuai kebutuhan dan jaringan lainnya seperti jaringan listrik dan telepon. Jumlah jalan, irigasi dan jaringan yang terdaftar pada KIB D berjumlah 79 buah dengan kondisi Baik

e) KIB E Aset Tetap Lainnya



Induk Ikan dan Benih Tanaman termasuk dalam kategori Aset Tetap lainnya karena diperoleh dengan cara pembelian, diantaranya yaitu induk ikan arwana, koi dan benih tanaman lengkung. Jumlah aset tetap

lainnya yang terdaftar pada KIB E sebanyak 369 buah.

f) KIB F Konstruksi dalam pengerjaan



Bangunan gedung kantor permanen yang beralamat di jalan Budi Utomo Kelurahan Siantan Hulu yang dipergunakan sebagai Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak termasuk kedalam kategori “Kontruksi dalam Pengerjaan” yang telah dimulai sejak tanggal 31 Desember 2009.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Kewenangan pembangunan urusan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan di Kota Pontianak dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak dengan mengedepankan Visi :



Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Melaksanakan 4 misi yaitu :

1. Memantapkan dan mengembangkan agribisnis pertanian, perikanan dan kehutanan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat;
2. Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan melalui pengelolaan sumberdaya yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan profesionalisme aparatur melalui penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan masyarakat;
4. Memaksimalkan peranan UPTD dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk serta pelestarian sumberdaya alam (plasma nutfah).

Sasaran strategis yang ingin dicapai melalui misi dimaksud yaitu :

1. Meningkatnya Produksi Pertanian Kota Pontianak;
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Kota Pontianak;
3. Berkembangnya sistem pengelolaan sektor kehutanan.

Sasaran strategis tersebut juga harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang nantinya dapat dijadikan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan. Adapun kebijakan-kebijakan antara lain : 1). Optimalisasi penerapan sistem usaha tani; 2). Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing produk pertanian; 3). Meningkatkan pelayanan dalam rangka mengembangkan potensi pertanian; 4). Penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya saing produk perikanan; 5). Meningkatkan pelayanan dalam rangka mengembangkan potensi perikanan; 6). Pengamanan hutan dan hasil hutan; 7). Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.

Untuk mewujudkan kebijakan dimaksud, selama kurun waktu 2010-2014 pelaksanaan program Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak tidak terlepas dari pelaksanaan program umum yang terdiri atas 6 (enam) program, pembangunan di bidang pertanian melaksanakan 10 (sepuluh) program dan pembangunan perikanan telah melaksanakan 4 (empat) program serta pembangunan bidang kehutanan yang telah melaksanakan 3 (tiga) program.

Tabel II - 4
Target Anggaran Program Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Tahun 2010 – 2014

No.	Sasaran	Uraian	Target Anggaran Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014*	
1	Program Umum	Pelayanan Administrasi Perkantoran	652.927.900	727.879.662	889.074.000	1.112.327.600	1.338.801.050	
2		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	935.702.500	841.536.000	265.413.000	468.663.950	331.364.700	
3		Peningkatan Disiplin Aparatur	21.805.000	22.380.000	31.525.000	22.200.000	43.200.000	
4		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	30.000.000	30.000.000	
5		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	43.216.400	36.792.000	20.657.800	29.953.700	56.231.550	
6		Pengembangan Sistem Informasi	27.780.000	16.180.000	61.500.000	89.123.000	198.390.000	
7	1. Meningkatnya Produksi Pertanian Kota Pontianak a. Meningkatnya jumlah produksi tanaman hortikultura (ku/ha) b. Volume hasil daging (kg/bulan)	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	7.000.000	-	-	211.045.000	-	
8		Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	-	-	2.250.582.500	1.200.963.000	1.264.850.000	
9		Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	50.880.000	11.380.000	-	-	-	
10		Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	-	-	-	763.455.000	473.640.000	
11		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak	23.346.600	16.950.000	37.927.000	117.783.200	277.347.000	
12		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	-	-	-	19.711.000	-	
13		Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-	53.730.000	228.057.500	
14		Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	-	-	-	-	98.100.000	
15		Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Peternakan	-	-	930.020.000	-	225.219.400	
16		Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pertanian, Perikanan dan Peternakan	1.489.849.250	928.632.000	706.967.900	844.160.700	853.272.700	
17		2. Meningkatnya Produksi Perikanan Kota Pontianak a. Volume ikan hasil budidaya (ton/ha)	Pengembangan Budidaya Perikanan	-	231.832.500	130.430.000	174.555.000	796.576.800
18			Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	8.050.000	-	1.937.835.000	685.520.000	522.360.000
19			Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Pavau dan Air tawar	1.112.767.300	1.085.600.000	1.383.375.400	1.026.886.800	643.590.600
20			Pengembangan Perikanan Tangkap	894.031.250	1.606.690.000	636.474.500	1.362.591.050	396.580.500
21		3. Berkembangnya sistem pengelolaan sektor kehutanan a. Luas areal hutan kota di wilayah Kota Pontianak (Ha)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	251.774.500	294.810.000	63.870.000	143.100.000	105.370.000
22			Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	-	10.020.000	7.025.000	17.225.000	18.555.000
23	Penataan, Perlindungan, serta Konservasi Pemanfaatan Sumberdaya Pangan dan Hutan		9.298.800	-	-	-	-	
JUMLAH TARGET			5.528.429.500	5.830.682.162	9.352.677.100	8.372.994.000	7.901.506.800	

Tabel II - 5
Realisasi Anggaran Program Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan
Tahun 2010 – 2014

No.	Sasaran	Uraian	Realisasi Anggaran Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014*	
1	Program Umum	Pelayanan Administrasi Perkantoran	572.011.004	543.567.295	769.917.876	1.008.618.446	1.338.801.050	
2		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	930.298.700	829.467.500	253.289.500	460.727.600	331.364.700	
3		Peningkatan Disiplin Aparatur	21.751.500	20.400.000	31.320.500	22.200.000	43.200.000	
4		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	3.950.000	30.000.000	
5		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	43.216.400	16.803.600	19.882.800	27.699.300	56.231.550	
6		Pengembangan Sistem Informasi	27.640.000	14.940.000	59.713.000	85.623.000	198.390.000	
7	1. Meningkatkan Produksi Pertanian Kota Pontianak a. Meningkatkan jumlah produksi tanaman hortikultura (ku/ha) b. Volume hasil daging (kg/bulan)	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	7.000.000	-	-	209.460.000	-	
8		Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	-	-	1.861.287.500	1.193.257.500	1.264.850.000	
9		Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	50.550.000	10.842.000	-	-	-	
10		Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	-	-	-	741.825.000	473.640.000	
11		Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak	23.346.600	16.950.000	37.927.000	103.385.200	277.347.000	
12		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	-	-	-	19.692.400	-	
13		Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-	53.530.000	228.057.500	
14		Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	-	-	-	-	98.100.000	
15		Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Peternakan	-	-	754.832.000	-	225.219.400	
16		Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pertanian, Perikanan dan Peternakan	1.473.859.900	921.508.000	697.776.600	834.300.700	853.272.700	
17		2. Meningkatkan Produksi Perikanan Kota Pontianak a. Volume ikan hasil budidaya (ton/ha)	Pengembangan Budidaya Perikanan	-	229.666.500	127.725.000	167.334.250	796.576.800
18			Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	8.050.000	-	1.907.869.500	672.157.000	522.360.000
19			Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air tawar	1.107.021.300	1.072.095.773,26	1.363.819.899,99	1.015.525.800	643.590.600
20			Pengembangan Perikanan Tangkap	887.684.700	1.586.461.500	625.654.250	1.339.613.000	396.580.500
21			Rehabilitasi Hutan dan Lahan	251.724.500	291.315.000	63.210.000	141.150.000	105.370.000
22		3. Berkembangnya sistem pengelolaan sektor kehutanan a. Luas areal hutan kota di wilayah Kota Pontianak (Ha)	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	-	8.760.000	7.025.000	17.095.000	18.555.000
23	Penataan, Perlindungan, serta Konservasi Pemanfaatan Sumberdaya Pangan dan Hutan		7.998.000	-	-	-	-	
JUMLAH REALISASI			5.412.152.604	5.562.777.168	8.581.250.426	8.117.144.196	7.901.506.800	

A. Pelayanan Bidang Pertanian

Realisasi Kinerja Program Pembangunan Urusan Pertanian

Pelaksanaan realisasi kinerja bidang pertanian dianalogikan pada keberhasilan pencapaian Indikator Sasaran pertama Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, yaitu :



Indikator telah tercapainya suatu sasaran adalah hasil realisasi yang mencapai nilai target bahkan melebihi, dalam hal ini meningkatnya produksi pertanian Kota Pontianak dinilai dengan 2 indikator, yaitu Meningkatnya jumlah produksi tanaman hortikultura (ku/ha) dan Volume hasil daging (kg/bulan).

Indikator pertama, meningkatnya jumlah produksi tanaman hortikultura dari tahun 2010 sampai 2014 secara berurutan adalah 208, 207, 206, 206, 206 ku/ha. Dari hasil perhitungan jumlah produksi tanaman hortikultura maka diperoleh pencapaian realisasi untuk produksi tanaman hortikultura dari tahun 2010 – 2013 sebanyak 180; 149; 8.356,11; 1.911,89 ku/ha selama 4 (empat) tahun 2013 dimana realisasi tersebut telah melebihi target.

Untuk indikator kedua, volume hasil daging dengan target pada periode 2010-2014 adalah 18.473, 18.873, 19.273, 19.673, 19.673 kg/bulan. Dengan target yang telah ditetapkan, pencapaian indikator sasaran secara berurutan tahun 2010-2013 sebesar 18.362; 111.348,78; 406.943,14; 627.863,25 kg/bulan. Data capaian kinerja sasaran pertama mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II - 6. Capaian Kinerja Sasaran Pertama Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2010-2014

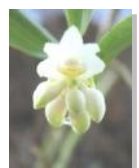
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Capaian kinerja sasaran (outcome)	
Pembangunan sektor pertanian di wilayah Kota Pontianak	Meningkatnya produksi pertanian Kota Pontianak	Meningkatnya Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (ku/ha)					
		Tahun 2010	208	180,00	86,54	SB	
		Tahun 2011	207	149,00	71,89	B	
		Tahun 2012	206	8.356,11	4.056,36	SB	
		Tahun 2013	206	1.911,89	928,10	SB	
		Tahun 2014	206	206*	100*	SB*	
		Volume Hasil Daging (kg/bulan)					
		Tahun 2010	18.473	18.362,00	99,40	SB	
		Tahun 2011	18.873	406.943,14	2.156,22	SB	
		Tahun 2012	18.873	406.943,14	2.156,22	SB	
		Tahun 2013	19.673	633.695,88	3.221,15	SB	
		Tahun 2014	19.673	19.673*	100*	SB*	

Keterangan : SB (Sangat Berhasil)
B (Berhasil)
CB (Cukup Berhasil)
TB (Tidak Berhasil)

Catatan : *) : Target Tahun 2014

a) Meningkatnya jumlah produksi tanaman hortikultura (ku/ha)

Peningkatan jumlah produksi tanaman hortikultura menjadi acuan untuk meningkatkan produksi pertanian di Kota Pontianak dikarenakan produk pertanian memiliki peranan yang sangat penting demi menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat khususnya di Kota Pontianak. Dalam proyeksi produksi komoditas pertanian Kota Pontianak yang tertuang dalam Renstra 2010-2014 digambarkan akan terjadi kenaikan jumlah produksi tanaman hortikultura



mulai dari tahun 2010 hingga 2013, namun dalam kenyataannya mengalami naik turun, walaupun masih termasuk ke dalam kategori “Berhasil”. Terjadinya penurunan produksi hortikultura disebabkan beberapa kendala diantaranya yaitu adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan, lahan pertanian yang tergenang air mengakibatkan rusaknya tanaman, kurangnya ketersediaan benih sayuran, sulitnya mendapatkan saprodi terutama pupuk urea dalam kondisi cuaca yang kurang baik. Berikut diuraikan produksi tanaman hortikultura di Kota Pontianak selama periode 2010-2014.



Tabel II - 7. Produksi Tanaman Hortikultura Pada Setiap Kecamatan di Kota Pontianak Tahun 2010-2014

Komoditas Utama	Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014*	
	Prod	Prov (kw/ha)	Prod	Prov (kw/ha)	Prod	Prov (kw/ha)	Prod	Prov (kw/ha)	Prod	Prov (kw/ha)
Sayuran	7.231,00		4.314,50		137.803,40		16.419,90		16.419,90	
Bawang daun	696,00	120,00	480,00	113,33	384,00	120,00	315,00	112,50	315,00	112,50
Petsai/sawi	2.358,00	180,00	584,00	120,00	948,00	120,00	1.063,00	154,06	1.063,00	154,06
Kacang Pjg	691,00	147,00	417,50	180,00	543,90	147,00	636,70	198,97	636,70	198,97
Cabe	84,00	0,00	76,50	70,00	144,00	120,00	68,00	85,00	68,00	85,00
Terong	420,00	0,00	192,00	70,00	84,00	120,00	255,50	283,89	255,50	283,89
Buncis	45,00	150,00	30,00	147,00	48,00	120,00	236,40	394,00	236,40	394,00
Ketimun	585,00	150,00	318,00	150,00	375,00	150,00	544,30	201,59	544,30	201,59
Kangkung	1.201,50	135,00	1.231,50	150,00	1.431,00	135,00	1.531,00	154,65	1.531,00	154,65
Bayam	787,50	125,00	680,00	135,00	1.037,50	125,00	1.202,00	156,10	1.202,00	156,10
Seledri	168,00	0,00	140,00	135,00	156,00	120,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Lobak	195,00	0,00	165	150,00	132,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Jamur	-	-	-	-	132.860,00	-	10.348,00	26,07	10.348,00	26,07
Buah	16.924,20		56.622,30		149.184,90		126.726,20		126.726,20	
Alpukat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belimbing	85,70	122,00	898,20	1.497,00	479,00	1.064,00	288,40	662,99	288,40	662,99
Duku/langsat	472,00	135,00	826,50	225,00	116,00	20,00	6.083,40	1.113,97	6.083,40	1.113,97
Durian	1.216,00	152,00	2.014,10	217,00	869,00	76,00	1.909,10	168,25	1.909,10	168,25
Jambu biji	150,00	375,00	559,00	179,00	1.008,00	382,00	1.221,30	444,81	1.221,30	444,81
Jambu air	178,50	297,00	987,00	525,00	1.106,00	871,00	560,90	462,09	560,90	462,09
Jeruk (gabungan)	628,60	1.571,00	2.407,10	1.168,00	5.982,00	2.199,00	5.337,60	2.469,97	5.337,60	2.469,97
Mangga	61,50	31,00	2.181,20	814,00	1.923,00	663,00	2.959,70	1.015,68	2.959,70	1.015,68
Manggis	60,00	120,00	1.177,20	619,00	130,00	90,00	551,60	380,41	551,60	380,41
Nangka/cempedak	2.873,30	1.436,00	7.887,00	223,00	21.500,00	666,00	8.564,40	265,05	8.564,40	265,05
Nenas	3.780,00	1.800,00	18.459,30	2.313,00	13.901,00	4.843,00	31.813,30	11.378,15	31.813,30	11.378,15
Pepaya	1.860,00	404,00	6.255,10	358,00	4.414,00	723,00	3.268,00	535,74	3.268,00	535,74
Pisang	3.560,10	1.047,00	5.934,00	487,00	57.835,00	10.515,00	36.512,40	6.908,68	36.512,40	6.908,68
Rambutan	860,80	662,00	2.132,50	120,00	36.786,00	1.072,00	25.122,50	734,53	25.122,50	734,53
Salak	759,50	475,00	3.126,40	553,00	281,00	117,00	84,80	66,15	84,80	66,15
Sawo	23,30	58,00	169,70	107,00	283,00	195,00	236,30	162,74	236,30	162,74
Sirsak	55,80	279,00	134,00	203,00	180,00	367,00	330,00	323,53	330,00	323,53
Sukun	176,30	881,00	727,80	1.348,00	390,00	736,00	287,20	537,83	287,20	537,83
Melinjo	122,80	41,00	746,20	85,00	2.001,90	31,00	1.595,30	345,53	1.595,30	345,53
Petai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jengkol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biofarmaka	4.912,00		5.652,00		2.252,32		9.229,82		9.229,82	
Lidah buaya	4.912,00	144,00	5.652,00	51,00	794,88	58,00	7.879,68	938,06	7.879,68	938,06
Jahe	-	-	-	-	493,48	-	292,20	302,17	292,20	302,17
Laos/lengkuas	-	-	-	-	368,50	-	398,84	454,80	398,84	454,80
Kencur	-	-	-	-	120,17	-	236,75	380,32	236,75	380,32
Kunyit	-	-	-	-	409,43	-	373,20	341,60	373,20	341,60
Lempuyang	-	-	-	-	0,70	-	2,53	272,97	2,53	272,97
Temulawak	-	-	-	-	65,07	-	46,00	213,95	46,00	213,95
Temuireng	-	-	-	-	0,11	-	0,63	300,00	0,63	300,00
Jumlah (ku/ha)										

Catatan :

1. Prod = Produksi dalam (ton); Prov = Produktivita dalam (kw/ha)
2. *) target 2014

b) Volume hasil daging (kg/bulan)

Produksi komoditas peternakan sebagai sumber protein hewani diharapkan dapat memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat Kota Pontianak. Produksi daging sangat dipengaruhi jumlah populasi ternak penghasil daging yang ada di Kota Pontianak. Data setiap tahunnya dari tahun 2010-2014 di Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel II-8. Populasi Ternak Penghasil Daging pada tahun 2010-2014 di Kota Pontianak

No	Tahun	Jumlah Populasi (ekor) pada tiap Kecamatan di Pontianak					Jumlah
		Sapi Potong	Kambing	Babi	Itik	Ayam	
1.	2010	2.024	1.850	250	5.648	40.330	50.102
2.	2011	5.015	1.775	340	16.421	673.085	696.636
3.	2012	6.286	1.513	357	13.930	93.253	115.339
4.	2013	3.550	2.707	200	9.870	91.620	107.947
5.	2014*	3.550	2.707	200	9.870	91.620	107.947

*) target 2014

Tabel II-9. Rekapitulasi Produksi Daging dan Telur pada tahun 2010-2014 di Kota Pontianak

No	Jenis Ternak	Jumlah Produksi Daging dan Telur pada tahun 2010-2014 di Pontianak					Jumlah
		2010	2011	2012	2013	2014*	
Daging (kg)							
1	Sapi Potong	1.214.534,00	1.745.100,00	1.059.733,86	1.457.354,00	1.457.354,00	8.281.555,72
2	Kambing	171.615,00	52.855,00	69.765,55	70.655,00	70.655,00	487.511,10
3	Babi	644.700,00	644.700,00	822.110,20	850.058,00	850.058,00	4.428.378,40
4	Ayam Ras	2.610.658,00	4.202.769,00	2.836.476,00	5.067.129,00	5.067.129,00	21.756.277,00
5	Ayam Buras	61.480	31.000,00	49.197,06	41.082,00	41.082,00	262.956,12
6	Itik	18.350	4.305,00	46.035,00	48.081,00	48.081,00	167.111,00
Jumlah		4.721.337,00	6.680.729,00	4.883.317,67	7.534.359,00	7.534.359,00	
Produksi daging per bulan		393.444,75	556.727,42	406.943,14	627.863,25	627.863,25	
Telur (kg)							
1	Ayam Buras	187.031,00	227.500,00	21.087,00	13.175,00	13.175,00	710.555,00
2	Itik	138.458,00	400,00	33.457,00	12.660,00	12.660,00	231.492,00
Jumlah		325.489,00	227.900,00	54.544,00	25.835,00	25.835,00	
Produksi telur per bulan		27.124,08	18.991,67	4.545,00	2.152,92	2.152,92	

*) target 2014

Keberhasilan kinerja pembangunan sektor pertanian dapat dilihat dari peningkatan jumlah produksi tanaman hortikultura serta volume hasil daging yang ada di wilayah Kota Pontianak. Peningkatan jumlah produksi tanaman hortikultura dapat dicapai melalui program Peningkatan produksi pertanian, peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan serta pengembangan sumberdaya sarana prasarana pertanian, perikanan dan kehutanan. Sedangkan volume hasil daging dapat dicapai dengan melaksanakan program peningkatan produksi hasil peternakan, peningkatan dan penerapan teknologi peternakan, pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak serta peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan,

Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Peternakan.

Tabel II-10
Realisasi Kinerja Program Dinas Pertanian Perikanan Dan Kehutanan
Urusan Pertanian Tahun 2010 – 2014

No.	Program/Kegiatan	Realisasi				
		2010	2011	2012	2013	2014*
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan					
1.1	Sosialisasi Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan	Sosialisasi Kualitas dan Teknis Kemasan Hasil Produksi Pertanian untuk 50 orang Petani	-	-	-	-
1.2	Pengolahan Informasi permintaan Pasar atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan					
	1.2.1. Pengembangan Usaha dan Pemasaran Pengolahan Hasil	-	-	-	100 buah Keranjang Panen; 1 unit Sarana Packaging; 2 unit Rumah Packaging; 10 buah timbangan (sarana pemasaran hasil yang diserahkan kepada masyarakat) serta sosialisasi kepada 90 orang.	-
	1.2.2. Pengadaan Alat Uji PMHP	-	-	-	1 Paket Penyediaan Alat uji Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	-
2	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan					
2.1	Sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	1 unit shadow house (24,84%)	Lanjutan 1 unit shadow house	-	-	-
3	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan					
3.1	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan					
	3.1.1 Pengembangan kawasan agropolitan	-	-	5 paket perbaikan di Orchid Centre	-	-
	3.1.2. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air	-	-	4 lokasi konstruksi jaringan air	-	-
	3.1.3. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan lahan	-	-	6 lokasi jalan usaha tani (JUT)	-	-
	3.1.4. Penyediaan prasarana dan sarana BBI Hortikultura	-	-	Bahan kimia, bibit lengkung dan sawo. power thresher dan power sprayer (diserahkan ke masyarakat)	-	-
	3.1.5. Penanganan pasca panen	-	-	206 unit alat pasca panen	-	-
	3.1.6. Perluasan areal pertanian	-	-	1 unit chooper (diserahkan ke masyarakat)	-	-

	3.1.7. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	-	-	-	Sarana Pengembangan Tanaman Hortikultura serta pengembangan desa model, GPOP, UPPO, Pasca panen dan irigasi Air Tanah (diserahkan ke masyarakat); 3 lokasi Jalan Usaha Tani (JUT) serta Gudang Cadangan Pangan dan Pagar BPP	
	3.1.8. Pengawasan Pupuk dan Pestisida				Sosialisasi Pengawasan dan Peredaran Pupuk dan Pestisida untuk 50 orang Petani serta Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Pestisida	
3.2	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan					
	3.2.1. Agroindustri tanaman pepaya	-	-	Tahun ke2 pemuliaan bibit pepaya		
	3.2.2. Peningkatan Produksi/produktivitas/mutu produk florikultura	-	-	Bahan pameran BOS, 3 kali workshop, 1 kali sosialisasi dan 1 kali pelatihan		
	3.2.3. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	-	-		Bibit lengkung untuk dikembangkan (1 paket); Bahan Obat-obatan dan Kimia untuk pengembangan bibit unggul serta bahan polybag 50kg kerondong buah 750 buah (untuk percontohan)	
4	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak					
4.1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	22 kali pengawasan	4 kali pengawasan, 1 paket pengawasan	2 kali pengawasan, 4 paket pengawasan	3 paket pengawasan (Pengawasan Hari Besar Keagamaan dan Pengawasan BAH HBAH)	
5	Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Peternakan					
5.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH Sapi	1 Paket	-	1 Paket		
5.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH Babi	-	-	1 Paket		

6	Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pertanian, Perikanan dan Peternakan					
6.1	Operasional AVC					
	6.1.1. Operasional AVC	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 paket	
	6.1.2. Pengadaan Peralatan dan Pelengkapan Aloe Vera Centre				Pengadaan gerobak, papan nama, AC, pompa air, printer	
6.2	Operasional Terminal Agribisnis	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 paket	
6.3	Operasional RPH Sapi					
	6.3.1. Operasional RPH Sapi	-	1 Paket	1 Paket	1 paket	
	6.3.2. Pengadaan Perlengkapan RPH Sapi				Pengadaan Kursi tamu, Kandang Jepit dan Pipa Besi Saluran Limbah Cair	
6.4	Operasional Orchid Center	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 paket	
6.5	Operasional RPH Babi	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 paket	
6.6	Operasional Raiser	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 paket	
6.7	Operasional Rumah Potong Unggas (RPU)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	-	-
6.8	Operasional Lab Kultur Jaringan	1 Paket	-	-	-	-
6.9	Peningkatan Sarana dan Prasarana Raiser	1 Paket	1 Paket	-	-	-
7.	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan					
7.1	Pengolahan Informasi Permintaan Pasar atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat					
	7.1.1. Pendataan Peternakan	-	-	-	Pendataan PSPK 1paket; Pendataan Pasar 1 paket; Sosialisasi Pendataan Peternakan kepada 72 orang	-
8	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan					
8.1	Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna					
	8.1.1. Pembangunan Kawasan Usaha Ternak	-	-	-	Perlengkapan pendukung KUNAK (Pressure pump, Bak air, Instalasi Air); bangunan pendukung KUNAK (RPH-SK, Instalasi Pengolahan Limbah, Kandang Pengembangan Ternak, Jalan Masuk, Pagar, Rumah jaga)	
9	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan					
9.1	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	-	-	-	-	-
10	Kesehatan Masyarakat Veteriner					
10.1	Penerapan kesejahteraan hewan melalui sosialisasi	-	-	-	Sosialisasi Betina Produktif kepada 50 peternak; sosialisasi Daging ASUH	-

					kepada 340 peserta	
10.2	Sertifikasi rumah pemotongan hewan	-	-	-	1 dokumen sertifikat Halal Pemotongan Sapi	-

Berdasarkan Tabel diatas pelayanan Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan pada bidang pertanian selama kurun waktu 2010–2014 dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan antara lain yaitu :

1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan dilaksanakan melalui 15 kegiatan antara lain yaitu :

1.1. Sosialisasi kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan

Kegiatan sosialisasi kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan dilaksanakan pada tahun 2010, kegiatan ini untuk memberikan tambahan ilmu tentang kualitas dan teknik kemasan hasil perkebunan dan pertanian yang diikuti 50 orang petani.

1.2. Pengolahan Informasi permintaan Pasar atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan.

Kegiatan Pengolahan Informasi permintaan Pasar atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan dilaksanakan pada tahun 2013 terdiri dari 2 sub kegiatan antara lain :

1.2.1. Pengembangan Usaha dan Pemasaran Pengolahan Hasil berupa pengadaan 100 buah Keranjang Panen; 1 unit Sarana Packaging; 2 unit Rumah Packaging; 10 buah timbangan (sarana pemasaran hasil yang diserahkan kepada masyarakat) serta sosialisasi pemasaran hasil pertanian kepada 90 petani.

1.2.2. Pengadaan Alat Uji PMHP, berupa pengadaan alat uji yang diserahkan kepada petugas Penguji Mutu Hasil Pertanian (PMHP).

2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program ini dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan :

2.1. Sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, kegiatan ini untuk melaksanakan pembangunan shadow house pada tahun 2010 telah rampung 24,84% dan dilanjutkan pada tahun 2011.

3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan antara lain :

3.2. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan dilaksanakan dengan 8 (delapan) Sub Kegiatan, antara lain :

3.2.2. Pengembangan kawasan Agropolitan.

Dilaksanakan pada tahun 2012 dengan pelaksanaan kegiatan di Orchid Centre berupa perbaikan paranet dan pengecatan shadow house, perbaikan atap dan pengecatan gazebo, pemasangan pipa air ledeng dari Aloe Vera Centre ke Orchid Centre.



3.2.3. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air, dilaksanakan pada tahun 2012 berupa pengadaan konstruksi jaringan air di 4 lokasi yaitu irigasi air tanah Kelurahan Siantan Tengah, Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Tenggara dan Kecamatan Pontianak Selatan.

3.2.4. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan lahan, dilaksanakan pada tahun 2012 berupa pengadaan konstruksi jalan usaha tani (JUT) di 6 lokasi yaitu JUT Flora, JUT Sungai Selamat, JUT Darma Putra, JUT Kebangkitan Nasional, JUT Pontianak Kota dan JUT Pontianak Tenggara. Selain itu pada sub kegiatan ini juga diberikan bantuan kepada masyarakat paranet sebanyak 50 roll di Kelurahan Siantan Hilir, Alat Pengolahan Pertanian Organik (APPO) sebanyak 3 unit di Siantan Hulu dan gerobak sorong sebanyak 50 unit di Kelurahan Batu Layang, Siantan Hulu, Siantan Hilir dan Siantan Tengah.

3.2.5. Penyediaan prasarana dan sarana Balai Perbenihan/Perbibitan (BBI Hortikultura), dilaksanakan pada tahun 2012 berupa pengadaan bahan kimia, bibit tanaman Lengkek dan Sawo untuk pohon induk di Balai Benih Hortikultura serta pengadaan power thresher sebanyak 2 unit diserahkan ke masyarakat di Kelurahan Sungai Beliung, pengadaan power spayer 10 unit untuk 4 kelurahan di kecamatan Pontianak Utara dan bibit Lengkek Diamond River sebanyak 250 bibit yang diserahkan ke masyarakat di kelurahan Kota Baru untuk desa wisata.

3.2.6. Penanganan Pasca Panen, dilaksanakan pada tahun 2012 yaitu pengadaan mesin penghancur sebanyak 2 unit, dongkrak sebanyak 1 unit, pengukus sebanyak 1 unit, keranjang panen 200 unit, packing dan printing cup 1 unit dan kemasan olahan sebanyak 1 unit yang diserahkan kepada pelaku usaha pengolah Lidah Buaya.

3.2.7. Perluasan areal pertanian, dilaksanakan pada tahun 2012, sub kegiatan ini berupa pengadaan chopper sebanyak 1 unit yang diserahkan ke masyarakat di kelurahan Parit Tokaya.

3.2.8. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan, dilaksanakan pada tahun 2013 berupa pengadaan Sarana Pengembangan Sayuran sebanyak 2 paket, sarana pengembangan tanaman lidah buaya, Pepaya, Anggrek dan tanaman hias masing-masing 1 paket, sarana pengembangan Desa Model sebanyak 2 paket, sarana pengembangan GOP dan UPPO masing-masing 3 paket sarana pasca panen 1 paket, Irigasi Air tanah di Kecamatan Pontianak Utara 3 paket, Jalan Usaha Tani di 2 Kecamatan serta pembangunan Gudang Cadangan Pangan dan Pagar BPP.

3.2.9. Pengawasan Pupuk dan Pestisida, dilaksanakan pada tahun 2013 berupa pengawasan dan Sosialisasi Peredaran dan Pengawasan Pupuk dan Pestisida kepada 50 peserta.

3.3. Pengembangan bibit unggul Pertanian/Perkebunan yang terdiri dari 3 sub kegiatan :

2.2.1 Agroindustri tanaman Pepaya, sub kegiatan ini berupa pelaksanaan pengadaan atau pemuliaan bibit Pepaya yang bekerjasama dengan BPTP Kalimantan Barat tahun 2012 merupakan tahun kedua pelaksanaan kegiatan ini, kegiatan ini akan berlangsung selama tujuh tahun untuk mendapatkan hasil bibit Pepaya murni.

2.2.2 Peningkatan Produksi/Produktivitas/Mutu Produk Florikultura sub kegiatan ini berupa pengadaan tanaman hias untuk kegiatan Borneo Orchid Show (BOS), Workshop sebanyak 3 kali yaitu merangkai bunga, perawatan/budidaya tanaman hias dan system pemasaran tanaman hias,



Sosialisasi pertanian organik 1 kali dan pelatihan pengolahan hasil yang dilaksanakan sebanyak 1 kali.

- 2.2.3. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan, sub kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2013 berupa pelaksanaan pengadaan Bibit Lengkeng untuk dikembangkan beserta sarana pendukungnya, berupa Bahan Kimia, Obat-obatan, polybag dan kerondong buah.

4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dilaksanakan dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

4.2. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dilaksanakan untuk pengawasan pemotongan ternak pada hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, pengawasan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan serta untuk pengawasan kesehatan ternak (Rabies dan Flu Burung) serta penanganan gangguan kesehatan ternak, pada tahun tahun 2010 dilakukan pengawasan sebanyak 22 kali, tahun 2011 dilakukan 4 kali pengawasan dan 1 paket pengawasan, tahun 2012 dilaksanakan 2 kali pengawasan dengan 4 paket pengawasan, tahun 2013 dilaksanakan pengawasan sebanyak 3 paket (Pengawasan Hari Raya Idul Fitri; Pengawasan Hari raya Idul Adha dan Pengawasan BAH HBAH).

5. Program Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Peternakan

Program ini terselenggara melalui 2 (dua) kegiatan antara lain :

5.2. Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH Sapi

Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana RPH Sapi dilaksanakan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelayanan di RPH Sapi, kegiatan peningkatan Sarana dan Prasarana RPH Sapi pada tahun 2010 dilaksanakan untuk penyediaan bahan pembersih RPH sapi sebanyak 10 jenis, bahan bakar minyak 1.601 liter, dan pemeliharaan peralatan RPH sapi sebanyak 7 unit serta pengadaan peralatan ternak sebanyak 16 buah serta tahun 2012 berupa peningkatan jalan masuk 1 ls, peningkatan kandang 1 ls, peningkatan sarana pengolahan limbah 1 ls, peningkatan instalasi air bersih 1 ls, pembuatan maenara air dan instalasi air 1 ls, penambahan sarana takal sebanyak 15 takal dan pengadaan blower bangunan RPH sapi sebanyak 1 paket.

5.3. Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH Babi

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana RPH Babi tahun 2012 berupa pengadaan peningkatan jalan penurunan ternak 1 ls, peningkatan sarana pengolahan limbah 1 ls, peningkatan kandang 1 ls dan peningkatan pintu gerbang masuk.

6. Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pertanian, Perikanan dan Peternakan

6.2. Operasional AVC

Kegiatan operasional AVC merupakan upaya dalam peningkatan pelayanan informasi *Aloe vera* dan berfungsinya AVC secara maksimal. Kegiatan ini dilaksanakan tiap tahunnya, pada tahun 2010 operasional AVC untuk pengadaan sebanyak 1 paket yang terdiri dari penyediaan pupuk sebanyak 1.850 karung serta pemeliharaan peralatan sebanyak 16 unit dengan dari kegiatan ini dapat dilihat tingkat kunjungan masyarakat ke AVC sebanyak 7.199 kali yang menandakan animo masyarakat terhadap AVC masih tinggi. Pada tahun 2013 dilakukan pengadaan sebanyak 1 paket terdiri dari pengadaan Gerobak, papan nama UPTD Agribisnis, AC 2 PK, Pompa Air dan Printer masing-masing 1 unit.

6.3. Operasional Terminal Agribisnis

Kegiatan operasional Terminal Agribisnis pelaksanaan kegiatan ini di tahun 2010 untuk dalam memperlancar kegiatan di Terminal Agribisnis dilaksanakan pengadaan sebanyak 1 paket, yang terdiri dari obat-obatan sebanyak 6 jenis serta pengadaan alat – alat pertanian sebanyak 8 buah, pada tahun 2010 di Terminal Agribisnis telah melaksanakan bongkar muat sebanyak 9 kali dengan total produk sebesar 42,97 ton. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahunnya.

6.4. Operasional RPH Sapi

Kegiatan operasional RPH Sapi dilaksanakan dalam upaya ini untuk menyediakan daging sapi yang ASUH hasil pengawasan serta berfungsinya UPTD RPH sapi secara maksimal dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD pada retribusi pemotogan sapi dengan pengadaan jasa pelaksanaan selama 12 bulan.

6.5. Operasional Orchid Center

Kegiatan operasional Orchid Center pada tahun 2010 sebanyak 1 paket dengan penyediaan bahan pembersih sebanyak 11 jenis, bahan/bibit tanaman sebanyak 7 jenis, obat-obatan sebanyak 10 jenis serta pengadaan alat pertanian sebanyak 14 jenis. Dari kegiatan ini dapat jumlah anggrek yang tersedia sebanyak 2.213 tanaman dengan 139 varitas/jenis.

6.6. Operasional RPH Babi

Kegiatan operasional RPH Babi pada tahun 2010 kegiatan operasional untuk memperlancar kegiatan di RPH babi dengan penyediaan bahan pembersih RPH babi sebanyak 6 jenis, bahan bakar minyak 3.898 liter, dan pemeliharaan peralatan RPH babi sebanyak 3 unit serta pengadaan peralatan ternak sebanyak 59 buah. Kegiatan ini dilaksanakan tiap tahunnya.

6.7. Operasional Raiser

Kegiatan operasional Raiser pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan tiap tahunnya, pada tahun 2010 untuk memperlancar kegiatan di Raiser sebanyak 1 paket,

dengan penyediaan bahan pembersih sebanyak 18 buah, pembelian bibit ikan 14 jenis serta pembelian pakan ikan sebanyak 1 paket dari kegiatan ini merupakan upaya dalam meningkatkan kelancaran pengelolaan raiser.

6.8. Operasional Rumah Potong Unggas (RPU)

Kegiatan operasional Rumah Potong Unggas (RPU) pada tahun 2010 melaksanakan operasional dalam memperlancar kegiatan di (RPU) Rumah Potong Hewan sebanyak 1 paket dengan pengadaan bahan pembersih sebanyak 19 jenis serta belanja peralatan pertanian sebanyak 5 jenis. kegiatan ini merupakan upaya dalam meningkatkan kelancaran pengelolaan RPH unggas.

6.9. Operasional Lab Kultur Jaringan

Kegiatan Operasional Lab Kultur Jaringan diselenggarakan pada tahun 2010, pelaksanaan kegiatan ini untuk penyediaan bibit lidah buaya dan Anggrek secara kultur jaringan.

6.10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Raiser

Pada tahun 2010 dilaksanakan untuk pengadaan mesin tebas 1 unit, tabung oksigen 3 unit, genset 1 unit, jalan 147 m², instalasi air 1 paket drainase 56 m, serta dengan ketersediaan bibit sebanyak 14 jenis ikan. Tahun 2011 menghasilkan aquarium hias lengkap, instalasi listrik raiser dan hatchery, peningkatan halaman raiser, drainase lanjutan dan penataan lingkungan raiser serta induk ikan hias sebanyak 1 paket.



7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dilaksanakan dengan 1 kegiatan yaitu pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2013. Kegiatan ini dilakukan dengan Pendataan Peternakan yaitu data PSPK, Pendataan Pasar serta dengan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai Pendataan peternakan sebanyak 72 peserta.

8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Program ini berupa kegiatan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna dilaksanakan pada tahun 2013, dengan sub Kegiatan Pengembangan Kawasan Usaha Ternak

(KUNAK) berupa pengadaan perlengkapan pendukung KUNAK (pressure pump, bak air, instalasi air masing-masing 1 unit) dan bangunan pendukung KUNAK (RPH-SK 1 unit, Instalasi Pengolahan Limbah 1 unit, Kandang Pengembangan Ternak 1 unit, Jalan Masuk 1 paket, Pagar 1 paket, Rumah Jaga 1 paket).

9. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program kesehatan masyarakat veteriner dilaksanakan dengan kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat dilaksanakan pada tahun 2014.

10. Program Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program kesehatan masyarakat veteriner dilaksanakan pada tahun 2013 terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

10.1. Kegiatan penerapan kesejahteraan hewan melalui sosialisasi

Kegiatan penerapan kesejahteraan hewan melalui sosialisasi berupa Sosialisasi Betina Produktif kepada 50 peternak, Sosialisasi Daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) kepada 340 peserta.

10.2. Kegiatan sertifikasi rumah pemotongan hewan, berupa pembuatan dokumen Sertifikasi Halal pada Rumah Pemotongan Sapi sebanyak 1 dokumen.

B. Pelayanan Bidang Perikanan

Realisasi Kinerja Program Pembangunan Urusan Perikanan

Pelaksanaan realisasi kinerja bidang Perikanan dianalogikan pada keberhasilan pencapaian Indikator Sasaran Kedua Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, yaitu :



Sasaran kedua Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak adalah Meningkatkan Produksi Perikanan Kota Pontianak. Indikator untuk mencapai sasaran kedua adalah Volume ikan hasil budidaya (ton/ha).

Target indikator dari tahun 2010 sampai 2014 secara berurutan adalah 65, 66, 67, 68, 68 ton/ha. Dari hasil perhitungan jumlah produksi ikan hasil budidaya maka diperoleh pencapaian realisasi dari tahun 2010 – 2013 sebanyak 62,21; 702.038,71; 759,87; 755,38 ton/ha selama 4 (empat) tahun 2013 dimana realisasi tersebut telah melebihi target. Hasil realisasi tahun 2011 terlihat melonjak tinggi dari pada tahun-tahun lainnya, hal ini disebabkan karena kesalahan metode perhitungan yang seharusnya menjadi 702,038 ton/ha, daftar target dan realisasi capaian sasaran kinerja diuraikan pada tabel berikut.

Tabel II-11. Capaian Kinerja Sasaran Kedua Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2010-2014

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Capaian kinerja sasaran (outcome)
Pembangunan sektor perikanan di wilayah Kota Pontianak	Meningkatnya produksi perikanan Kota Pontianak	Volume ikan hasil budidaya (ton/ha)				
		Tahun 2010	65	62,210	95,71	SB
		Tahun 2011	66	702,038	1.063,69	SB
		Tahun 2012	67	759,870	1.134,13	SB
		Tahun 2013	68	755,380	1.110,85	SB
		Tahun 2014	68	68*	100,00*	SB

Catatan : *) = Target Tahun 2014

Capaian Indikator Sasaran Kinerja Meningkatkan Produksi Perikanan Kota Pontianak diperoleh dari produksi hasil perikanan budidaya dari tahun 2010-2014 yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel II-12. Produksi Ikan Hasil Budidaya dalam Kolam/Bak/Petakan dan Keramba Jaring Apung (KJA) di Kota Pontianak Tahun 2010-2014

No	Tahun	Budidaya dalam Kolam/Bak/Petakan						
		Jumlah Kolam (Unit)	Luas (m ²)	Jenis Ikan dan Produksi (Ton)				Jumlah Produksi (Ton)
				Mas	Nila	Lele	Lain-lain	
1	2010	403	7.251	19,374	51,452	180,830	40,972	292,628
2	2011	403	7.251	22,382	60,002	210,303	47,142	339,830
3	2012	463	8.324	33,592	95,587	213,981	114,582	457,742
4	2013	532	8.684	11,738	41,252	322,421	94,199	469,61
5	2014*	532	8.684	11,738	41,252	322,421	94,199	469,61
No	Tahun	Budidaya dalam Keramba Jaring Apung (KJA)						
		Jumlah Kolam (Unit)	Luas (m ²)	Jenis Ikan dan Produksi (Ton)				Jumlah Produksi (Ton)
				Mas	Nila	Lele	Lain-lain	
1	2010	467	3.818	114,648	187,070	19,588	76,594	397,899
2	2011	537	4.391	137,579	224,485	23,505	91,914	477,483
3	2012	560	4.593	134,367	223,038	29,179	28,645	523,783
4	2013	608	4.929	160,778	329,924	31,996	35,99	558,689
5	2014*	608	4.929	160,778	329,924	31,996	35,99	558,689

*) Target 2014

Keberhasilan pelayanan di bidang perikanan ditandai dengan meningkatnya jumlah produksi ikan yang berasal baik dari usaha budidaya masyarakat menggunakan kolam/ bak/ petakan dan keramba jaring apung dan jaring tancap serta dari hasil penangkapan di wilayah pengelolaan perikanan Laut Cina Selatan (WPP 711). Baik itu usaha pengembangan perikanan budidaya, tangkap maupun pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Pemerintah Kota Pontianak melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak menyalurkan pendanaan atau bantuan sarana dan prasarana yang dapat menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas produksi kelautan dan perikanan serta pembinaan bagi pelaku usahanya.

Tabel II-13. Realisasi Kinerja Program Pembangunan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2010 - 2014

No.	Program/Kegiatan	Realisasi				
		2010	2011	2012	2013	2014*
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengembangan Budidaya Perikanan					
1.1	Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan	-	1 loket pelayanan penyuluhan perikanan	1 paket alat test kualitas air	1 sepeda motor, 2 filing cabinet, 1 personal computer, 1 printer, 1 UPS, 4 Cartridge, 1 software window, 1 antivirus premium, 4 meja kerja, 1 meja rapat, 20 kursi rapat, 1 sound system	
1.2	Penyediaan sarana statistik kelautan dan perikanan	-	1 Laptop, 2 Kamera Digital	2 sepeda motor, 1 laptop, 1 printer A3, 1 unit infokus	1 sepeda motor, 3 filing cabinet, 1 personal computer, 1 UPS, 1 printer, 4 Cartridge, 3 harddisc eksternal, 1 software window, 1 antivirus premium, 1 Handycam, 1 tripod, 1 voice recorder, 5 handy talkie, 1 laptop, 3 modem	
2	Pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar					
2.1	Peningkatan sarana prasarana BBI lokal	1 paket peralatan, 14 paket sarana penunjang BBI	1 paket sarana prasarana BBI	12 paket sarana prasarana BBI	2 paket sarana penunjang BBI Lokal; 8 paket peningkatan/pembangunan fisik BBI Lokal; 60 unit kolam terpal (diserahkan ke masyarakat); 2 mesin tebas rumput, 1 AC, 1 pompa air lengkap, 1 kulkas, 4 bak fiber, 2 tangki fiber.	
2.2	Operasional BBI	1 paket operasional BBI	1 paket operasional BBI	1 paket operasional BBI	1 paket operasional BBI	
2.3	Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan	220 unit waring/jaring	-	-		
3	Pengembangan Perikanan Tangkap					
3.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan	6 unit motor ikan, 4 alat tangkap, 4 gerobak dorong, 1 unit genset	6 kapal motor, 6 lampu penerangan, 1 paket jalan	22 gerobak sorong, 55 keranjang, pembangunan pagar, kanopi, instalasi air bersih beserta rumah, instalasi kabel pengeras, alat bantu penangkap ikan	10 unit GPS (diserahkan ke masyarakat); 6 gerobak, 1 aki genset, 1 pengecas aki genset, 3 AC, 2 pompa air, 1 set kursi tamu, 1 buffet, 30 m ² gorden; 9 paket peningkatan/rehab/penambahan prasarana penunjang TPI	
3.2	Operasional Tempat Pelelangan Ikan	1 paket	1 Paket	1 Paket	1 paket	
3.3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Ikan	-	-	1 paket perencanaan	-	-

				dan pengawasan		
3.4	Penyediaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	1 bangunan SPDN	-	-	-
4	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan					
4.1	Peningkatan Mutu&Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan	-	-	Perbaiki atap hatchery dan perbaiki drainase BBI	-	-
	4.1.1. Optimalisasi Sarana Pemasaran Ikan Hias	-	-	-	1 paket calon induk ikan hias, 60 lampu aquarium, 5 blower, 60 pump aquarium, e refrigerator, 60 heater, 1 mesin tebas rumput, 1 audio visual, 1 paket peningkatan prasarana	
	4.1.2. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	-	-	-	Sosialisasi perundang-undangan perikanan kepada 300 orang; temu usaha perikanan sebanyak 50 orang; sosialisasi pemanfaatan PPI kepada 150 orang	
	4.1.3. Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ikan	-	-	-	Sosialisasi penyakit ikan kepada 300 orang; sosialisasi CBIB kepada 300 orang; 1 dokumen pengawasan penyakit ikan	
	4.1.4. Peningkatan Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan	-	-	-	3 unit Kendaraan roda 2 + cool box; 300 pasang sepatu boot; 300 pisau; 300 talenan plastic; 300 celemek plastic; 300 pasang sarung tangan karet; 10 freezer; 50 cool box; 3 paket plastik kemasan; 3 paket plastik; 1 paket sarana pengolahan kerupuk (diserahkan ke masyarakat)	
4.2	Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran	-	-	Sarana dan prasarana pasar ikan Nipah Kuning, Raiser dan PPI		
4.3	Pengawasan mutu hasil perikanan	23 kali	-	-		

Berdasarkan Tabel di atas pelayanan Dinas Pertanian perikanan dan Kehutanan bidang urusan kelautan dan perikanan selama kurun waktu 2010–2014 dilaksanakan melalui 4 (empat) program dan 12 (dua belas) kegiatan antara lain yaitu:

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kegiatan yang merupakan upaya dalam peningkatan urusan di bidang perikanan di Kota Pontianak. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :

1.1. Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan

Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan pada tahun 2011 dilaksanakan untuk pembangunan loket pelayanan penyuluhan perikanan sebanyak 1 unit. Pada tahun 2012 kegiatan ini dilakukan untuk pengadaan peralatan penyuluhan perikanan yaitu alat test kualitas air sebanyak 1 paket. Pada tahun 2013 kegiatan ini dilakukan untuk pengadaan 1 sepeda motor, 2 filing cabinet, 1 personal computer, 1 printer, 1 UPS, 4 Cartridge, 1 software window, 1 antivirus premium, 4 meja kerja, 1 meja rapat, 20 kursi rapat, 1 sound system.

1.2. Penyediaan sarana statistik kelautan dan perikanan

Kegiatan penyediaan sarana statistik kelautan dan perikanan di tahun 2011 dilaksanakan untuk pengadaan laptop sebanyak 1 unit dan kamera digital sebanyak 2 unit. Pada tahun 2012 hasil kegiatan berupa pengadaan sepeda motor sebanyak 2 unit, laptop sebanyak 1 unit, printer A3 sebanyak 1 unit dan infokus sebanyak 1 unit. Pada tahun 2013 hasil kegiatan berupa 1 sepeda motor, 3 filing cabinet, 1 personal computer, 1 UPS, 1 printer, 4 Cartridge, 3 harddisc eksternal, 1 software window, 1 antivirus premium, 1 Handycam, 1 tripod, 1 voice recorder, 5 handy talkie, 1 laptop, 3 modem.

2. Program Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan antara lain :

2.1. Peningkatan sarana prasarana BBI lokal

Kegiatan peningkatan sarana prasarana BBI lokal dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan sarana dan prasarana di BBI guna memberikan layanan penyediaan benih ikan yang berkualitas baik dimana pelaksanaan kegiatan ini pada tahun 2010 dilaksanakan untuk pengadaan sebanyak 1 unit Mesin Tebas, Pengadaan 2 unit Pompa Air, Pengadaan 33 unit Heater, Pengadaan 33 unit Aerator, Pengadaan 3 unit Tabung Oksigen serta 1 paket Laptop dan 14 paket sub kegiatan pembangunan sarana BBI lokal yaitu peningkatan kolam reservoir 1 paket, salurahn pemasukan dan pengeluaran air 1 paket,



drainase lanjutan 1 paket, instalasi listrik 1 paket, kanopi BBI 1 unit, peningkatan lab 1 unit, penataan lingkungan BBI 1 paket, finishing rumah packing 1 unit, peningkatan pagar BBI 1 paket, peningkatan tanggul kolam BBI 1 paket, pemasangan teralis 1 paket, finishing pintu pagar masuk BBI 1 unit, pemasangan besi teralis pagar 1 paket, induk ikan konsumsi 1 paket. Tahun 2011 dilaksanakan untuk pengadaan 1 unit mobil pengangkut benih, pengadaan 2 buah pompa air, 2 buah kerambah jaring apung, 2 unit blower dan perlengkapannya, 2 buah mesin pakan ikan, 440 buah jaring, 1 paket peralatan laboratorium kering, rumah mesin pakan ikan sebanyak 1 unit, dan selang air, instalasi pengolahan air bersih, kolam reservoir sebanyak 1 paket, serta aquarium sebanyak 3 buah. Tahun 2012 dilakukan untuk pengadaan induk ikan konsumsi sebanyak 1 paket, jaring/waring 440 unit, tangki air 1 unit, peralatan laboratorium kering 1 unit, instalasi pengolahan air bersih 1 unit, peningkatan kolam reservoir 1 paket, pembangunan kolam kultur pakan hidup sebesar 20 m², peningkatan halaman parkir 1 lumpsum, pembangunan rumah tamu 1 unit, pembangunan pagar pembatas 1 lumpsum, peningkatan menara pengawas 1 unit dan pengadaan bahan demplot vaksinasi ikan mas 1 paket. Tahun 2013 dilakukan dengan pengadaan Calon induk ikan konsumsi 1 paket, Bahan kimia laboratorium 1 paket; peningkatan/pembangunan : halaman BBI 1 paket, Instalasi Air 1 paket, Saluran Air 1 paket, instalasi listrik 1 paket, laboratorium 1 paket, lingkungan BBI 1 paket, kolam penampung air 1 paket, kolam 1 paket; 60 unit kolam terpal (diserahkan ke masyarakat); 2 mesin tebas rumput, 1 AC, 1 pompa air lengkap, 1 kulkas, 4 bak fiber, 2 tangki fiber.

2.2. Operasional BBI

Kegiatan operasional BBI dilaksanakan sebagai upaya untuk menunjang berfungsinya BBI lokal secara optimal. Pada tahun 2009 dilakukan pembelian 1 paket bibit ikan, bahan obat-obatan dan vitamin. Pada tahun 2010 dilakukan pengadaan 1 paket obat-obatan dan belanja BBM/gas/pelumas serta biaya peralatan kebersihan, pada tahun 2011 dianggarkan untuk belanja bahan obat-obatan, pakan dan tenaga keamanan. Tahun 2012 operasional BBI hanya menganggarkan untuk pembelian BBM, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, cangkul, kantong plastik, belanja obat-obatan dan vitamin, tahun 2013 operasional BBI juga masih menganggarkan yang sama seperti tahun 2012.

2.3. Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan

Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan dilaksanakan pada tahun 2010 dilaksanakan untuk pengadaan waring atau jaring untuk keperluan prasarana ikan budidaya air tawar dengan jumlah waring/jaring sebanyak 220 unit, dari kegiatan ini dapat meningkatkan jumlah keramba sebanyak 467 unit dengan jumlah produksi perikanan budidaya sebanyak 397,899 ton.

3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program pengembangan perikanan tangkap dilaksanakan dengan merealisasikan 4 (empat) kegiatan yaitu :

3.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan dilaksanakan pada tahun 2010 diadakan 6 unit gerobak dorong, mesin kompresor 1 unit, pengadaan genset 30 KVA 1 unit, peningkatan instalasi listrik 1 paket, pekerjaan turap pemecah ombak 1 paket, pekerjaan teralis pemangaman kantor dan gudang 1 paket, peningkatan pagar 1 paket serta peningkatan rumah genset 1 paket, selain itu terdapat pula pengadaan 6 unit kapal motor beserta alat bantu penangkap ikan yang diberikan kepada kelompok nelayan Kota Pontianak (masing-masing unit terdiri dari badan kapal, mesin diesel kapal ukuran 5GT, sub kipas propeler dan handle serta GPS). Pada tahun 2011 untuk menunjang sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan berupa 6 unit kapal motor lengkap, lampu penangkap ikan sebanyak 6 unit dan lampu penerangan dermaga dan jalan sebanyak 1 paket, tahun 2012 dilaksanakan untuk pengadaan gerobak sorong 22 buah, keranjang 55 buah, pembangunan pagar 1 paket, pembangunan kanopi 1 paket, pengadaan instalasi air bersih 1 paket, instalasi kabel pengecas 1 unit, pembangunan rumah instalasi air bersih 1 unit, dan pengadaan alat bantu penangkapan ikan sebanyak 4 unit yang diserahkan kepada masyarakat. Pada Tahun 2013 dilaksanakan untuk pengadaan 10 unit GPS (diserahkan ke masyarakat); 6 gerobak, 1 aki genset, 1 pengecas aki genset, 3 AC, 2 pompa air, 1 set kursi tamu, 1 buffet, 30 m² gorden; 9 paket peningkatan/rehab/penambahan prasarana penunjang TPI yaitu 1 paket peningkatan halaman parker, 1 paket peningkatan daya listrik PPI, 1 paket peningkatan instalasi listrik dermaga dan jalan, rehab/penambahan kanopi dermaga 1 paket, keramik lantai lelang 1 paket, pagar PPI 1 paket, Pos Jaga 1 paket, Gerbang Masuk PPI 1 paket, Lantai PPI 1 paket.



3.2. Operasional Tempat Pelelangan Ikan

Kegiatan Operasional Tempat Pelelangan Ikan dilaksanakan agar dapat memberikan kelancaran aktivitas di tempat pendaratan ikan yang terletak di eks Kantor Dinas Kebersihan Kota Pontianak secara baik dan teratur yang mulai

dioperasikan pada bulan Mei tahun anggaran 2011. Pada tahun 2012 jumlah kapal nelayan yang sudah bersandar di PPI yaitu sebanyak 32 kapal ukuran 20-30 GT dan 11 kapal ukuran 5-10 GT. Pada tahun 2013 jumlah kapal nelayan yang sudah bersandar di PPI yaitu sebanyak 33 kapal ukuran 20-30 GT.

3.3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Ikan

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Ikan pada tahun 2012 dilaksanakan berupa pengadaan jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan untuk peningkatan sarana dan prasarana pasar ikan di Nipah Kuning.

3.4. Penyediaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan pada tahun 2011 dan untuk pembangunan SPDN di Pangkalan Pendaratan Ikan yang terletak di eks Kantor Dinas Kebersihan Kota Pontianak. Ijin operasional SPDN Kota Pontianak tersebut saat ini masih dalam proses pengurusan administrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan antara lain :

4.1. Peningkatan Mutu&Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan

Kegiatan Peningkatan Mutu&Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan dilaksanakan pada tahun 2012 untuk pengadaan berupa perbaikan atap Hatchery yang terkena angin putting beling dan perbaikan drainase di Balai Benih Ikan (BBI).

Pada Tahun 2013, kegiatan ini dilakukan dengan 4 (empat) sub kegiatan, antara lain :

4.1.1. Optimalisasi sarana pemasaran ikan hias, berupa pengadaan 1 paket calon induk ikan hias, 60 lampu aquarium, 5 blower, 60 pump aquarium, e refrigerator, 60 heater, 1 mesin tebas rumput, 1 audio visual, 1 paket peningkatan prasarana Raiser.

4.1.2. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, berupa kegiatan Sosialisasi perundang-undangan perikanan kepada 300 orang; temu usaha perikanan sebanyak 50 orang; sosialisasi pemanfaatan PPI kepada 150 orang

4.1.3. Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ikan, berupa kegiatan Sosialisasi penyakit ikan kepada 300 orang; sosialisasi CBIB kepada 300 orang; 1 dokumen pengawasan penyakit ikan

4.1.4. Peningkatan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran, berupa pengadaan 3 unit Kendaraan roda 2 + cool box; 300 pasang sepatu boot; 300 pisau; 300 talenan plastic; 300 celemek plastic; 300 pasang sarung tangan karet; 10

freezer; 50 cool box; 3 paket plastik kemasan; 3 paket plastik; 1 paket sarana pengolahan kerupuk (diserahkan ke masyarakat)

4.2. Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran

Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran dilaksanakan pada tahun 2012 untuk menunjang aktivitas perikanan di pasar ikan Nipah Kuning berupa pengadaan instalasi air bersih, instalasi listrik, pembuatan drainase, pengadaan bak air 1 paket dan pembuatan IPAL.

Pengadaan sarana dan prasarana di Raiser berupa pengadaan pompa aquarium raiser dan perlengkapannya sebanyak 44 unit, drainase raiser lanjutan, instalasi listrik raiser dan hatchery, penataan lingkungan raiser, peningkatan pintu dan kanopi raiser, peningkatan hatchery raiser dan peningkatan pintu pagar masuk raiser, belanja calon induk ikan hias 1 paket, pembangunan pos jaga raiser 1 unit.

Pada Pangkalan Pendaratan Ikan Sui Jawi Kota Pontianak juga terlaksana pengadaan 1 unit bangunan Cold Storage. Adapun operasional Cold Storage baru dapat dilaksanakan setelah penambahan daya listrik di PPI terselenggara. Penambahan daya listrik di PPI dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 dengan Dana APBD Kota Pontianak

4.3. Pengawasan mutu hasil perikanan

Kegiatan Pengawasan mutu hasil perikanan dilakukan pada tahun 2010 untuk pengawasan mutu hasil ikan segar, ikan olahan serta tes kit formalin sebanyak 5 kotak dengan 9 kali pengawasan dalam setahun.

C. Pelayanan Bidang Kehutanan

Realisasi Kinerja Program Pembangunan Urusan Perikanan

Pelaksanaan realisasi kinerja bidang kehutanan dianalogikan pada keberhasilan pencapaian Indikator Sasaran Ketiga Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan, yaitu :

Sasaran III **BERKEMBANGNYA SISTEM PENGELOLAAN SEKTOR KEHUTANAN**

Sasaran ketiga Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak adalah Berkembangnya sistem pengelolaan sektor kehutanan Kota Pontianak. Indikator untuk mencapai sasaran kedua adalah Luas areal hutan kota di wilayah Kota Pontianak (ha).

Target indikator dari tahun 2010 : 6; 2011 : 6,5; 2012 : 7, 2013 : 7,5 ha dan 2014 : 7,5 ha. Realisasi dari tahun 2010 – 2013 sebanyak 5 ha; 6,5 ha; 22,25 ha dan 22,50 ha selama 4 (empat) tahun 2013 dimana realisasi tersebut telah melebihi target. Daftar target dan realisasi capaian sasaran kinerja diuraikan pada tabel berikut.

Tabel II-14. Capaian Kinerja Sasaran Ketiga Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2010-2014

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Capaian kinerja sasaran (outcome)	
Pengelolaan sektor kehutanan di wilayah Kota Pontianak	Berkembangnya sistem pengelolaan sektor kehutanan	Luas areal hutan kota di wilayah Kota Pontianak (ha)					
		Tahun 2010	6	5	83,33	SB	
		Tahun 2011	6,5	6,5	100,00	SB	
		Tahun 2012	7	22,25	317,86	SB	
		Tahun 2013	7,5	22,50	300,00	SB	
		Tahun 2014*	7,5	7,5*	100,00	Target 2014	

Capaian sasaran “berkembangnya pengelolaan kehutanan” telah tercapai dengan nilai Sangat Berhasi. Pencapaian ini didukung oleh data luasan dan lokasi hutan kota di wilayah Kota Pontianak yang telah dibakukan dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 603 Tahun 2010 tentang Kawasan Hutan Kota yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel II-15. Lokasi Kawasan Hutan Kota di Kota Pontianak Tahun 2010-2014

No	Kecamatan	Lokasi	Luasan (ha)				
			2010	2011	2012	2013	2014*
1.	Pontianak Tenggara	Lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak, Kelurahan Bangka Belitung	-	-	5	5	5
2.	Pontianak Kota	Komplek Stadion Atletik Kota Pontianak Jalan Ampera, Kelurahan Sungai Jawi	-	-	4	4	4
3.	Pontianak Selatan	Jalan Karya Baru Gg. Karya Baru IV	-	4	-	-	-
		Fasilitas Umum Pemerintah Kota Pontianak Jalan Sulawesi, Kelurahan Akcaya	-	-	0,25	0,25	0,25
		Areal depan Gedung Pemuda KNPI Jalan Sutan Syahrir, Kelurahan Akcaya	-	-	0,25	0,25	0,25
4.	Pontianak Utara	Jl. Kebangkitan Nasional	-	2,5	-	-	-
		Buffer Zone Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, Kelurahan Batu Layang	-	-	3	3	3
		Areal Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pontianak, Kelurahan Siantan Hilir	-	-	2	2	2
		Buffer Zone Raiser Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Kelurahan Siantan Hilir	-	-	2	2	2
		Buffer Zone Sub Terminal Agribisnis Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Kelurahan Siantan Hilir	1	-	1	1	1
		Buffer Zone UPTD RPH Babi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Kelurahan Siantan Hulu	3	-	3	3	3
		Buffer Zone Sirkuit Balap Motor, Kelurahan Batu Layang	1	-	1	1	1
5.	Pontianak Timur	Buffer Zone Balai Benih Ikan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Kelurahan Parit Mayor	-	-	0,5	1	1
6.	Pontianak Barat	Buffer Zone Gedung Bulutangkis Kota Pontianak dan SMK Negeri 9, Kelurahan Sungai Jawi	-	-	0,25	0,25	0,25
Jumlah			5	6,5	22,25	22,50	22,50

*) target 2014

Sesuai dengan karakteristik kota pada umumnya maka sektor kehutanan di wilayah Kota Pontianak mencakup pengelolaan dan penertiban peredaran hasil hutan di wilayah Kota Pontianak. Tujuan kinerja yang ingin dicapai pada pembangunan bidang kehutanan adalah terbentuknya hutan kota yang memadai demi mewujudkan Kota Pontianak sebagai suatu kawasan yang berwawasan lingkungan yang tetap menyediakan ruang terbuka hijau bagi masyarakat.

Tabel II-16
Realisasi Kinerja Program Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Urusan Kehutanan Tahun 2010 – 2014

No.	Program	Realisasi				
		2010	2011	2012	2013	2014*
1	Rehabilitasi hutan dan lahan					
1.1	Penghijauan	1.150 pohon	Gerobak dorong, 16.600 pohon	3.500 pohon	-	-
	1.1.1. Penghijauan	-	-	-	1.400 batang tanaman kayu-kayuan; 2.100 batang bibit tanaman MPTS	-
	1.1.2. Hutan kota	-	-	-	1 paket pendukung kegiatan hutan kota; 1 area fasilitas bermain anak-anak	-
1.2	Penghijauan tahap II	34.400 pohon	-	-	-	-
1.3	Pembuatan hutan kota	2.2 Ha	-	-	-	-
2	Pemanfaatan potensi sumber daya hutan					
2.1	Optimalisasi Penerimaan bukan pajak (PNBP)	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	

Berdasarkan Tabel diatas pelayanan Dinas Pertanian Perikanan dan kehutanan bidang kehutanan selama kurun waktu 2010–2014 dilaksanakan melalui 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan antara lain yaitu :

1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program pada pembangunan bidang kehutanan diselenggarakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu :

1.1. Penghijauan

Kegiatan penghijauan di Kota Pontianak dilakukan dengan menanam bibit pohon kayu – kayuan dan tanaman MPTS. Pada tahun 2010 dilakukan penanaman bibit pohon sebanyak 1.150 batang dengan luas areal penanaman 2,6 ha. Kegiatan ini merupakan upaya menumbuh kembangan anak dalam kegiatan “kecil menanam dewasa memanen” (KMDM) yang dilaksanakan di Sekolah Dasar sekota

Pontianak, serta membentuk 2 kelompok kebun bibit rakyat yang berlokasi di Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Pontianak Utara. Tahun 2011 anggaran untuk kegiatan ini berupa pengadaan gerobak dorong dan tanaman kehutanan sebanyak 16.600 batang yang diserahkan kepada kelompok tani Angsana di Kecamatan Pontianak Utara sebanyak 7.000 batang bibit pohon Tanjung dan 1.600 bibit pohon Mahoni. Di Kecamatan Pontianak Selatan juga diserahkan 6.000 bibit pohon Tanjung dan 2.000 bibit pohon Sukun kepada kelompok tani Asri.

Untuk tahun 2012 melalui kegiatan ini telah terlaksananya pengadaan bibit tanaman Karet sebanyak 3.500 batang yang diserahkan kepada masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu dan Kelurahan Batulayang dengan luas lahan 3,5 Hektar.

Tahun 2013 kegiatan ini dibagi menjadi 2 sub kegiatan, yaitu :

1.1.1. Penghijauan, dilakukan dengan menyediakan bibit sebanyak 1.400 batang tanaman kayu-kayuan; 2.100 batang bibit tanaman MPTS yang ditanam di seluruh kecamatan Kota Pontianak.

1.1.2. Hutan Kota, dilakukan dengan pengadaan 1 paket pendukung kegiatan hutan kota (1 Handsprayer, 500 Batang Bibit Tanaman Kayu-kayuan, 100 kg Pupuk Organik, 50 liter Herbisida) dan dilakukan penanaman di UPTD Raiser dan UPTD Terminal Agribisnis; 1 area fasilitas bermain anak-anak sebagai pendukung bangunan Hutan Kota.

1.2. Penghijauan tahap II

Kegiatan penghijauan tahap II dilaksanakan pada tahun 2010 dengan melakukan penanaman bibit tanaman sebanyak 34.400 batang kayu dengan luas areal penanaman seluas 35 ha yang di tanam di wilayah Kecamatan Pontianak Utara.

1.3. Pembuatan hutan kota

Kegiatan pembuatan hutan kota dilaksanakan pada tahun 2010 anggaran kegiatan ini untuk pembelian atau pengadaan bibit tanaman kayu – kayuan sebanyak 1,430 batang dengan luas areal penanaman seluas 2.2 Ha yang dilaksanakan di Pontianak Utara pada daerah RPH Babi dan Terminal Agribisnis.

2. Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan

Program lain pada bidang kehutanan yaitu pemanfaatan potensi sumber daya hutan, pada program ini diselenggarakan 2 (dua) kegiatan yaitu :

2.1. Optimalisasi Penerimaan bukan pajak (PNBPN)

Kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 2009 dan berlanjut sampai dengan sekarang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah bukan pajak. Pada tahun 2009 dapat mengoptimalkan peningkatan PNBPN sebesar 15%. Pada tahun 2010 dana ini digunakan untuk pengembangan, pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan, dimana pada kegiatan ini terdapat pengadaan komputer sebanyak 1 unit dan perjalanan dinas keluar daerah sebanyak 1 kali.

Tahun 2011, 2012 dan 2013 pelaksanaan kegiatan ini adalah perjalanan dinas dalam daerah yang bertujuan melakukan pembinaan dan monitoring pelaku usaha kehutanan yang dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

2.2. Pengembangan, pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan

Kegiatan pengembangan, pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan dilaksanakan pada tahun 2009 dimana kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penatausahaan hasil hutan dalam upaya tertib administrasi peredaran hasil hutan.

D. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan

Capaian Kinerja Sasaran Rencana Strategis Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak didukung dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2010-2014 yang diuraikan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel II-17. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2010-2014

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014*	2010	2011	2012	2013	2014*
Meningkatnya produksi pertanian Kota Pontianak	Meningkatnya Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (ku/ha)	208	207	206	206	206	180,00	149,00	8.356,11	1.911,89	206	86,54	71,89	4.056,37	928,10	100
	Volume Hasil Daging (kg/bulan)	18.473	18.873	18.873	19.673	19.673	18.362,00	406.943,14	406.943,14	633.695,88	19.673	99,40	2.156,22	2.156,22	3.221,15	100
Meningkatnya produksi perikanan Kota Pontianak	Volume ikan hasil budidaya (ton/ha)	65	66	67	68	68	62,210	702,038	759,870	755,380	68	95,71	1.063,69	1.134,13	1.110,85	100
Berkembangnya sistem pengelolaan kehutanan	Luas areal hutan kota di wilayah Kota Pontianak (ha)	6	6,5	7	7,5	7,5	5	6,5	22,25	22,50	7,5	83,33	100	317,86	300,00	100

*) Target Tahun 2014

Pada tabel di atas terlihat beberapa lonjakan angka realisasi capaian kinerja, dan yang paling tinggi adalah pada Sasaran Meningkatkan Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (ku/ha) pada tahun ke-3 (2012). Rasio capaian sampai dengan 4.056,37 % dari target, hal ini dikarenakan pada tahun 2012 komoditas tanaman hortikultura yang dihitung meliputi 12 komoditas sayuran, 23 komoditas buah-buahan dan 8 komoditas biofarmaka mengikuti komoditas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian RI dalam E-form hortikultura sedangkan pada tahun sebelumnya 2011 komoditas sayur dan buah yang ikut dihitung hanya komoditas unggulan saja serta tanaman biofarmaka belum ikut diperhitungkan.

Tabel II-18. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2010-2014

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata Pertumbuhan	
		2010	2011	2012	2013	2014*	2010	2011	2012	2013	2014*	2010	2011	2012	2013	2014*	Anggaran	Realisasi
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	652.927.900	727.879.662	889.074.000	1.112.327.600	1.338.801.050	572.011.004	543.567.295	769.917.876	1.008.618.446	1.338.801.050	87,61	74,68	86,60	90,68	100,00	16,35	18,12
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	935.702.500	841.536.000	265.413.000	468.663.950	331.364.700	930.298.700	829.467.500	253.289.500	460.727.600	331.364.700	99,42	98,57	95,43	98,31	100,00	-56,58	-58,41
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	21.805.000	22.380.000	31.525.000	22.200.000	43.200.000	21.751.500	20.400.000	31.320.500	22.200.000	43.200.000	99,75	91,15	99,35	100,00	100,00	9,55	8,94
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	30.000.000	30.000.000	-	-	-	3.950.000	30.000.000	-	-	-	13,17	100,00	25,00	46,71
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	43.216.400	36.792.000	20.657.800	29.953.700	56.231.550	43.216.400	16.803.600	19.882.800	27.699.300	56.231.550	100,00	45,67	96,25	92,47	100,00	-4,45	-15,68
6	Pengembangan Sistem Informasi	27.780.000	16.180.000	61.500.000	89.123.000	198.390.000	27.640.000	14.940.000	59.713.000	85.623.000	198.390.000	99,50	92,34	97,09	96,07	100,00	22,02	19,27
7	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	7.000.000	-	-	211.045.000	-	7.000.000	-	-	209.460.000	-	100,00	-	-	99,25	-	25,00	25,00
8	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	-	-	2.250.582.500	1.200.963.000	1.264.850.000	-	-	1.861.287.500	1.193.257.500	1.264.850.000	-	-	82,70	99,36	100,00	4,41	12,42
9	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	50.880.000	11.380.000	-	-	-	50.550.000	10.842.000	-	-	-	99,35	95,27	-	-	-	-86,78	-91,56
10	Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	-	-	-	763.455.000	473.640.000	-	-	-	741.825.000	473.640.000	-	-	-	97,17	100,00	9,70	10,84
11	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Ternak	23.346.600	16.950.000	37.927.000	117.783.200	277.347.000	23.346.600	16.950.000	37.927.000	103.385.200	277.347.000	100,00	100,00	100,00	87,78	100,00	35,73	35,90
12	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	-	-	-	19.711.000	-	-	-	-	19.692.400	-	-	-	-	99,91	-	25,00	25,00
13	Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-	53.730.000	228.057.500	-	-	-	53.530.000	228.057.500	-	-	-	99,63	100,00	44,11	44,13
14	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	-	-	-	-	98.100.000	-	-	-	-	98.100.000	-	-	-	100,00	25,00	25,00	
15	Pengembangan Budidaya Perikanan	-	231.832.500	130.430.000	174.555.000	796.576.800	-	229.666.500	127.725.000	167.334.250	796.576.800	-	99,07	97,93	95,86	100,00	31,41	30,71
16	Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pertanian, Perikanan dan Peternakan	1.489.849.250	928.632.000	706.967.900	844.160.700	853.272.700	1.473.859.900	921.508.000	697.776.600	834.300.700	853.272.700	98,93	99,23	98,70	98,83	100,00	-18,62	-18,35
17	Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Peternakan	-	-	-	-	225.219.400	-	-	-	-	225.219.400	-	-	-	100,00	25,00	25,00	
18	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	8.050.000	-	1.937.835.000	685.520.000	522.360.000	8.050.000	-	1.907.869.500	672.157.000	522.360.000	100,00	-	98,45	98,05	100,00	-28,48	-28,13
19	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air tawar	1.112.767.300	1.085.600.000	1.383.375.400	1.026.886.800	643.590.600	1.107.021.300	1.072.095.773,26	1.363.819.899,99	1.015.525.800	643.590.600	99,48	98,76	98,59	98,89	100,00	-18,81	-18,49
20	Pengembangan Perikanan Tangkap	894.031.250	1.606.690.000	636.474.500	1.362.591.050	396.580.500	887.684.700	1.586.461.500	625.654.250	1.339.613.000	396.580.500	99,29	98,74	98,30	98,31	100,00	-74,59	-73,50
21	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	251.774.500	294.810.000	63.870.000	143.100.000	105.370.000	251.724.500	291.315.000	63.210.000	141.150.000	105.370.000	99,98	98,81	98,97	98,64	100,00	-81,86	-81,50
22	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	-	10.020.000	7.025.000	17.225.000	18.555.000	-	8.760.000	7.025.000	17.095.000	18.555.000	-	87,43	100,00	99,25	100,00	30,94	35,52
23	Penataan, Perlindungan, serta Konservasi Pemanfaatan Sumberdaya Pangan dan Hutan	9.298.800	-	-	-	-	7.998.000	-	-	-	-	86,01	-	-	-	-	0,00	0,00
24	Peningkatan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Peternakan	-	-	930.020.000	-	-	-	-	754.832.000	-	-	-	-	81,16	-	25,00	25,00	

*) Target Tahun 2014

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD

Tantangan dan Peluang Pelayanan SKPD dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

a) Peluang :

1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bahan pangan sehat dan ASUH
2. Pertumbuhan jumlah penduduk
3. Terbukanya kemitraan dengan pelaku usaha
4. Segmen pasar untuk produk – produk pertanian, peternakan dan perikanan masih terbuka luas
5. Inovasi teknologi baru dari berbagai jenis dan sumber
6. Adanya dukungan dan kerjasama dengan instansi lain
7. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan bidang pertanian, perikanan dan Kehutanan

b) Tantangan :

1. Beralihnya fungsi lahan pertanian ke non-pertanian
2. Peran swasta dalam mendukung program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah
3. Rendahnya kepemilikan aset pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan untuk akses ke perbankan
4. Lemahnya modal usaha petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan serta pelaku usaha.
5. Masuknya produk impor yang membuat produk pertanian, perikanan dan kehutanan tidak mampu bersaing
6. Adanya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), Hama dan Penyakit Ikan, Penyakit Menular strategis pada hewan, dan iklim yang tidak menentu
7. Harga saprodi cenderung mahal saat dibutuhkan dan produk pertanian cenderung murah pada saat panen
8. Kota Pontianak merupakan salah satu wilayah yang tidak memiliki Wilayah Pengelolaan Perikanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan tangkap.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

1. Permasalahan Pembangunan Bidang Pertanian

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan bidang pertanian, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian
- b. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana belum optimal
- c. Keterbatasan penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil produk pertanian
- d. Fluktuasi harga yang tidak stabil dan disparitas harga yang cukup tinggi di tingkat petani dan konsumen
- e. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan
- f. Status dan luas kepemilikan lahan yang terbatas
- g. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian
- h. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pertanian
- i. Usaha peternakan rakyat umumnya masih ekstensif / tradisional dan belum menerapkan system agribisnis sehingga produksi dan produktifitas ternak masih rendah.
- j. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM teknis peternakan dan kesehatan hewan (dokter hewan, sarjana peternakan, tenaga medic dan para medic peternakan).
- k. Keterbatasan sarana dan prasarana peternakan.

2. Permasalahan Pembangunan Bidang Perikanan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan bidang perikanan, sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- b. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Perikanan
- c. Rendahnya tingkat konsumsi ikan di Kota Pontianak

3. Permasalahan Pembangunan Bidang Kehutanan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan bidang kehutanan, sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pengelolaan hutan kota
- b. Masih terdapatnya lahan kritis yang perlu segera ditangani
- c. Belum optimalnya penatausahaan hasil hutan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kota Pontianak :

*“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan,
Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik,
Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”*

Misi Kota Pontianak:

Sesuai dengan visi Kota Pontianak yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Terdepan dalam Kualitas Sumber Daya Manusia, Prima dalam Pelayanan Publik, Didukung dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih”, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Pontianak 2015 – 2019 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis.
2. Menerapkan prinsip-prinsip Good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan publik.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar perkotaan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota dan wilayah.
4. Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni.
5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran untuk menyelenggarakan urusan pembangunan daerah dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan secara profesional, transparan dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan melalui:

1. Pernyataan misi ke 4 : Mewujudkan tata ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman aman dan layak huni. Pada misi ke empat ini peran dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah mendukung Kota Pontianak menjadi kota yang berwawasan lingkungan melalui penghijauan lingkungan dan mengurangi luas lahan kritis yang ada di Kota Pontianak.
2. Pernyataan misi ke 5 : Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna memacu pertumbuhan ekonomi kota yang berdaya saing. Pada misi ke lima ini terlihat jelas peran dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah berpartisipasi aktif dalam menyediakan prasarana dan sarana untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan

hortikultura, meningkatkan produksi daging, meningkatkan produksi ikan baik itu ikan air tawar hasil budidaya maupun ikan laut dari penangkapan di perairan selain itu peran Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berupaya secara konkrit dalam meningkatkan nilai tambah dan menghasilkan produk-produk yang berdaya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan, meningkatkan PDRB sektor pertanian dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Kota Pontianak.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat Dan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

1. Renstra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

Visi dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah :

"Terwujudnya Produksi Tanaman Pangan yang Cukup dan Berkelanjutan"

Untuk mencapai visi di atas, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengemban misi yang harus dilaksanakan adalah:

- a. Mewujudkan birokrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang profesional dan berintegritas;
- b. Meningkatkan perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat dan berkelanjutan;
- c. Mengembangkan sistem penyediaan benih yang efisien, efektif, dan berkelanjutan;
- d. Meningkatkan penanganan pascapanen tanaman pangan;
- e. Meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan berkelanjutan, dan;
- f. Mendorong peran serta instansi dan stakeholder terkait serta masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan yang berkelanjutan.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberikan gambaran dan peran serta dan keterlibatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak melaksanakan tugas dan fungsi secara keseluruhan dan berkesinambungan dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan berupaya menyediakan prasarana dan sarana budidaya dan pasca panen bagi petani untuk meningkatkan produksi tanaman pangan yang berkelanjutan untuk mencapai swasembada pangan di Kota Pontianak.

2. Renstra Direktorat Jenderal Hortikultura

Visi dari Direktorat Jenderal Hortikultura yaitu :

"Terwujudnya Sistem Produksi dan Distribusi Hortikultura Industrial yang Efisien, Berdaya Saing dan Berkelanjutan serta Menghasilkan Produk yang Aman Konsumsi untuk Mencukupi Kebutuhan Dalam Negeri dan Ekspor"

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu :

- a. Mewujudkan pengembangan kawasan hortikultura yang berkelanjutan, efisien, berbasis IPTEK dan sumber daya lokal serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan agribisnis.
- b. Mewujudkan ketersediaan sarana produksi secara tepat
- c. Meningkatkan penerapan teknik budidaya dan pasca panen yang baik dan ramah lingkungan
- d. Menjadikan sumberdaya manusia (SDM) dan kelembagaan yang professional
- e. Mewujudkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan segar asal hortikultura
- f. Mendorong terciptanya kebijakan dan regulasi untuk pengembangan agribisnis hortikultura serta meningkatnya investasi hortikultura
- g. Mendorong tersedianya infrastruktur kawasan dan sistem distribusi hortikultura
- h. Mendorong terbinanya sistem penyuluhan, sistem informasi teknologi, pembiayaan dan pelayanan lainnya
- i. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas hortikultura yang transparan, jujur dan berkeadilan

Telaahan terhadap visi, misi dan program Direktorat Jenderal Tanaman Hortikultura memberikan gambaran dan peran serta dan keterlibatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak dalam upaya secara keseluruhan dan konsisten membantu petani dalam mengembangkan kawasan hortikultura yang berwawasan lingkungan, membantu menyediakan prasarana dan sarana, membantu menerapkan teknik budidaya dan pasca panen yang tepat untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan menjaga mutu tanaman hortikultura secara berkelanjutan.

3. Renstra Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Visi dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yaitu :

**"Menjadi Institusi yang Peduli dan Memiliki Komitmen Tinggi
Untuk Mewujudkan Masyarakat Pertanian Sejahtera, Handal dan Berdaya Saing
di Bidang Pengolahan dan Pemasaran hasil Pertanian melalui
Menyelenggarakan Birokrasi yang Profesional dan Berintegritas"**

Untuk mencapai visi tersebut di atas, diemban misi yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran petani yang merupakan basis ekonomi perdesaan, yang nantinya di harapkan sebagai wadah peningkatan peran dari petani produsen menjadi petani pemasok melalui penerapan manajemen, teknologi dan permodalan secara profesional.

- b. Mengembangkan sistem agroindustri terpadu di perdesaan melalui, keterpaduan sistem produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, sehingga mampu memberikan peningkatan pendapatan petani, kesempatan kerja di perdesaan dan peningkatan nilai tambah produk pertanian secara adil serta profesional.
- c. Mengembangkan penerapan sistem jaminan mutu hasil pertanian secara efektif dan operasional untuk meningkatkan daya saing produk segar dan olahan, baik di pasar domestik maupun internasional.
- d. Meningkatkan daya serap pasar domestik melalui kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien
- e. Meningkatkan akses pasar luar negeri hasil pertanian melalui kebijakan promosi dan proteksi produk pertanian yang efektif dan efisien.
- f. Mengembangkan kapasitas institusi Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yang profesional dan berintegritas moral tinggi.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian memberikan gambaran dan peran serta dan keterlibatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan atau kelompok pengolah hasil pertanian dengan berupaya menumbuhkembangkan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran hasil, mengembangkan sistem agroindustri, meningkatkan nilai tambah, daya saing dan menjaga serta mengawasi mutu hasil olahan tanaman pangan dan hortikultura secara berkelanjutan.

4. Renstra Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Visi dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yaitu :

"Mewujudkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagai Motor Penggerak Tersedianya Prasarana dan Sarana Pertanian, untuk Pembangunan Pertanian Berkelanjutan"

Untuk mencapai Visi tersebut Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengemban Misi sebagai berikut :

- a. Mendorong partisipasi stake holder dalam pengembangan dan pengelolaan lahan dan air secara efektif dan efisien untuk kegiatan pertanian berkelanjutan.
- b. Mendayagunakan lahan dan air untuk kegiatan pertanian yang berkelanjutan.
- c. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi pembangunan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- d. Menyusun kebijakan pengembangan perluasan areal, pengelolaan lahan dan pengelolaan air yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat petani di pedesaan.
- e. Mewujudkan dan mengembangkan sistem pembiayaan usaha pertanian yang fleksibel dan sederhana.

- f. Memfasilitasi penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida sesuai azas 6 (enam) tepat (jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga)
- g. Meningkatkan pengawasan atas penyediaan, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida
- h. Meningkatkan pelayanan pendaftaran pupuk dan pestisida
- i. Mendorong peran serta masyarakat dan stakeholder terkait dalam penyediaan dan pengawasan pupuk dan pestisida.
- j. Menyelenggarakan pengembangan sistem mekanisasi pertanian di Indonesia melalui kebijakan pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan arah pembangunan pertanian.
- k. Memberikan pelayanan prima dalam bidang perencanaan, administrasi dan manajemen pembangunan prasarana dan sarana pertanian.

Pernyataan dari visi dan misi dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengamanahkan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak untuk dapat membantu petani mengembangkan dan mengelola lahan pertanian dan air secara efektif dan efisien, memfasilitasi dalam hal penyediaan sarana prasaran pertanian dan mengawasi penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida serta mewujudkan manajemen dan administrasi kegiatan pertanian untuk mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

5. Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Berdasarkan amanat Undang-undang dan Peraturan terhadap tugas dan fungsi maka visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian adalah :

**"Mewujudkan Peternakan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan
dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal
untuk Mewujudkan Penyediaan dan Keamanan Pangan Hewani
serta Peningkatan Kesejahteraan Ternak"**

Visi tersebut mengandung 6 (enam) kata kunci yang merupakan pernyataan keinginan yang mencerminkan mimpi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Keenam kata kunci tersebut yakni: (1) profesional; (2) berdaya saing; (3) berkelanjutan; (4) sumber daya lokal; (5) penyediaan dan keamanan pangan hewani; dan (6) kesejahteraan peternak.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian adalah:

- a. Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan daya saing produksi dan produk peternakan dengan pemanfaatan sumberdaya lokal secara berkelanjutan;
- b. Menyelenggarakan dan menggerakkan pengembangan perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, serta kesehatan masyarakat veteriner dan pascapanen dalam mencapai penyediaan dan keamanan pangan hewani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan peternak;
- c. Meningkatkan profesionalitas dan integritas penyelenggaraan administrasi publik.

Pernyataan visi dan misi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yaitu berupaya secara optimal meningkatkan kesejahteraan peternak dengan turut serta menyediakan pangan hewani yang aman, sehat, berdaya saing melalui pengembangan kawasan ternak, penyediaan bibit dan pakan, pengelolaan budidaya ternak, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner serta pasca panen.

6. Renstra Kementerian Perikanan Republik Indonesia

Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

"Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015"

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah **Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.**

Telaahan terhadap visi dan misi Kementerian Perikanan Republik Indonesia yang ingin mewujudkan Indonesia menjadi negara penghasil produk kelautan dan perikanan maka amanah tersebut juga disambut oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang mewujudkan pencapaian visi dan misi kementerian kelautan dan perikanan dengan melaksanakan beberapa kebijakan antara lain dengan melakukan beberapa program dengan pendanaan dari Kementerian antara lain Peningkatan Kesejahteraan Nelayan, Peningkatan Usaha Minapedesaan Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, menyalurkan Sarana dan Prasarana Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan dan menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan sumber daya aparatur maupun pelaku usaha bidang Kelautan dan Perikanan.

7. Renstra Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Visi dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

"Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan"

Untuk menjabarkan visi tersebut diatas, Kementerian Kehutanan telah menetapkan 6 (enam) misi dan tujuan utama penyelenggaraan pembangunan kehutanan periode tahun 2010 - 2014 yaitu :

- Misi 1 : Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan, dengan tujuan untuk meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi pengelolaan sumber daya hutan secara lestari.
- Misi 2 : Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) untuk memperkuat kesejahteraan rakyat sekitar hutan dan keadilan berusaha, dengan tujuan untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan hutan produksi.
- Misi 3 : Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumber daya alam, dengan tujuan menurunkan gangguan keamanan hutan dan hasil hutan.
- Misi 4 : Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial, dengan tujuan meningkatkan kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai guna mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Misi 5 : Meningkatkan ketersediaan produk teknologi dasar dan terapan serta kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan hutan secara optimal, dengan tujuan untuk menyediakan informasi ilmiah dalam pengelolaan hutan lestari, baik dalam tatanan perumusan kebijakan maupun kegiatan teknis pengelolaan hutan di lapangan, serta tersedianya SDM kehutanan yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan.
- Misi 6 : Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan Kementerian Kehutanan, dengan tujuan penyediaan perangkat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan hutan lestari, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang kehutanan dan terlaksananya tertib administrasi pada Kementerian Kehutanan.

Telaahan terhadap visi dan misi Kementerian Kehutanan RI Hubungan korelasi tersebut bersifat saling melengkapi dan menguatkan, sehingga tercipta sinergisitas perencanaan pembangunan kehutanan dan optimalisasi penyelenggaraan urusan kehutanan antara Pemerintah Pusat (Kementerian Kehutanan RI) dengan Pemerintah Kota Pontianak

8. Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat
Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat adalah

"Terwujudnya Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Modern, Berbudaya Industri, Berbasis Pedesaan dan Berdaya Saing"

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan fungsi manajemen pembangunan pertanian tanaman pangan dan Hortikultura yang efektif
- b. Meningkatkan produksi tanaman pangan dan Hortikultura secara berkelanjutan
- c. Meningkatkan mutu, daya saing, nilai tambah dan pemasaran produk pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, dari hasil telaahan tersebut Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan pertanian selama lima tahun kedepan yaitu dengan berusaha secara optimal meningkatkan kesejahteraan petani dan atau kelompok pengolah hasil pertanian dengan melaksanakan fungsi manajemen pembangunan pertanian yang tepat, berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura dengan menyediakan prasarana dan sarana, menumbuhkembangkan kelembagaan usaha petani, kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil, mengembangkan sistem agroindustri, meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan menjaga serta mengawasi mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura secara berkelanjutan.

9. Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat.

Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat adalah

"Mewujudkan Ketersediaan Produk Peternakan yang Cukup dan Berkualitas Melalui Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang Tangguh"

Terdapat 2 (dua) Misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- a. Meningkatkan produksi hasil peternakan
- b. Meningkatkan kesehatan hewan dan keamanan lingkungan budidaya serta melindungi masyarakat terhadap penyakit hewan menular strategis.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat, maka Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak menetapkan

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang peternakan selama lima tahun kedepan yaitu dengan berusaha secara optimal meningkatkan kesejahteraan peternak dan atau kelompok pengolah hasil peternakan dengan melaksanakan fungsi manajemen pembangunan peternakan yang tepat, berupaya meningkatkan produksi hasil peternakan yang aman dan sehat serta berdaya saing dengan menyediakan kawasan peternakan yang terpadu, menyediakan prasarana dan sarana, turut serta menumbuhkembangkan kelembagaan usaha peternak, kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil, menjaga kesehatan hewan dan lingkungan budidaya serta melindungi masyarakat dari penyakit hewan menular strategis secara berkelanjutan.

10. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

"Terwujudnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Barat yang Berdaya Saing
Berbudaya dan Berkelanjutan untuk Mewujudkan
Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat"

Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

- a. Mewujudkan sumber daya manusia aparatur dinas yang profesional, beretos kerja tinggi sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal
- b. Mewujudkan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengendalian dan monitoring pembangunan kelautan dan perikanan yang semakin efektif, efisien dan akuntabel
- c. Mewujudkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengelolaan wilayah pesisir dan PPK secara terpadu dan berkelanjutan
- d. Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap yang Semakin Maju, Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan
- e. Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan budidaya yang semakin maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan
- f. Mewujudkan pengelolaan dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Kalbar yang semakin maju, ramah lingkungan dan berkelanjutan
- g. Mewujudkan pengelolaan usaha pada sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Barat yang tertib dan taat hukum serta peraturan per UU yang berlaku.

11. Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

Visi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat.

"Mewujudkan Pembangunan Kehutanan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan
Guna Menjamin Kelestarian Sumber Daya Hutan dan Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat"

Sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut diatas dan dengan memperhatikan berbagai faktor lingkungan strategis eksternal maupun internal yang berpengaruh (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman), maka terdapat 5 (lima) misi SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dalam menyelenggarakan pembangunan kehutanan periode tahun 2013 - 2018 yaitu :

- a. Melaksanakan pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan, optimalisasi pemanfaatan hutan alam produksi, serta pengembangan sistem informasi kehutanan;
- b. Melaksanakan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, optimalisasi pembangunan hutan tanaman, serta pemberdayaan masyarakat didalam dan disekitar hutan;
- c. Melaksanakan peningkatan pemanfaatan produksi hasil hutan, optimalisasi penerimaan dana bagi hasil sektor kehutanan, serta pengembangan industri primer hasil hutan kayu;
- d. Melaksanakan pengamanan dan perlindungan hutan, optimalisasi pemanfaatan hutan lindung dan konservasi, serta pengendalian kerusakan sumber daya hutan termasuk kebakaran hutan dan lahan;
- e. Melaksanakan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan kehutanan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kehutanan, pelayanan umum dan sumber daya aparatur, serta penatausahaan keuangan dan asset.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, maka Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kehutanan selama lima tahun kedepan yaitu dengan berusaha secara optimal melaksanakan penatausahaan hasil hutan dan rehabilitasi lahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pontianak.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

1. Telaahan terhadap RTRW Kota Pontianak

Berdasarkan pola ruang yang tertuang pada RTRW Kota Pontianak, kegiatan pertanian potensial Kota Pontianak dialokasikan di Kecamatan Pontianak Utara yang didukung dengan keberadaan Kawasan Sentra Agribisnis. Kawasan Sentra Agribisnis adalah kawasan yang direncanakan untuk mendukung dan memperkuat pengembangan potensi lokal Kota Pontianak. Potensi utama yang ditonjolkan adalah komoditas pertanian yang mencirikan Kota Pontianak seperti lidah buaya (Aloe Vera), sayuran daun, Pepaya dan lain-lain. Selain itu pengembangan kawasan sentra agribisnis juga diharapkan akan saling melengkapi pengembangan pariwisata Khatulistiwa Kota Pontianak selain mendorong percepatan hasil produksi dan pengembangan wilayah. Alokasi pemanfaatan ruang untuk kawasan sentra agribisnis seluas ± 800 Ha (7,42 %). Sampai dengan saat

ini penggunaan lahan pada Kawasan Sentra Agribisnis mencapai 254,5 Ha (31.67%) dengan rincian pemanfaatan untuk kawasan Lidah Buaya, Pepaya dan Jagung 198,5 Ha, Kawasan Tanaman Kacang-Kacangan, dan Sayuran Dataran Rendah 42 Ha, Kawasan Peternakan 5 Ha, Kawasan RPH dan Puslitbang Terpadu 6 Ha, Kawasan Sub Terminal Agribisnis 2 Ha, Kawasan Pendidikan dan Kesehatan seluas 1 Ha, berbagai program dan kegiatan prioritas sebagai bentuk pelayanan SKPD telah dan akan dilakukan pada kawasan tersebut.

Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usahatani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir. Kawasan budidaya peternakan pada saat ini relatif semakin sulit dijumpai di tingkat kabupaten/kota, karena kompetisi penggunaan lahan semakin tinggi dan dukungan pemerintah daerah yang terbatas. Di lain pihak, kebutuhan dan konsumsi daging semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan usia serta kesejahteraan penduduk yang semakin baik.

Kegiatan peternakan lainnya yang cukup berkembang di beberapa wilayah di Kalimantan Barat adalah budidaya walet. Maka dari itu dalam upaya pengelolaan perkembangan budidaya walet sebagai rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami menjadi salah satu bentuk penggunaan lahan Kota Pontianak. Lokasi budidaya walet di Kota Pontianak diarahkan pada wilayah Kecamatan Pontianak Utara (sekitar Jalan 28 Oktober dan jalan Kebangkitan Nasional). Kedepannya dalam hal peredaran sarang burung walet akan dilengkapi dengan dokumen legalitas berupa surat angkutan sarang burung walet. Arahan dari Kepala Daerah Kota Pontianak dan komitmen Kepala SKPD agar semua aktivitas peternakan di Kota Pontianak akan dilaksanakan pada kawasan peternakan terpadu di Kecamatan Pontianak Utara. Program dan kegiatan bidang peternakan sebagai bentuk pelayanan SKPD dilakukan pada kawasan tersebut antara lain telah membangun kandang komunal bagi peternak sapi sehingga aktivitas peternakan yang ada di wilayah Kota Pontianak dilakukan dalam suatu kawasan dalam rangka mengurangi dampak lingkungan di kawasan permukiman perkotaan.

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tertuang di dalam RTRW Kota Pontianak digunakan sebagai kawasan pengembangan pertanian dan penghijauan Kota Pontianak yang sejalan dengan visi Kepala Daerah Kota Pontianak.

Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dan potensial. Kawasan Minapolitan yang ditetapkan disepanjang Sungai Kapuas dengan dua buah inti yaitu kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan di Jalan Kom Yos Sudarso di belakang eks kantor Dinas Kebersihan Kelurahan Sei Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat sebagai *core* atau inti kawasan perikanan tangkap dan Balai Benih Ikan dengan luas $\pm 1,4$ Ha di Jalan Rais Rahman Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur sebagai *core*

atau inti kawasan perikanan budidaya, selain itu dalam mendukung pengembangan ikan hias yang memiliki penggemar cukup banyak di Kota Pontianak, telah dibangun Pusat Ikan Hias (Raiser) seluas ± 2 Hektar tepatnya di Jalan Parit Pangeran Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak, jenis ikan yang tersedia yaitu ikan hias air tawar dan ikan hias air laut. Keberadaan kawasan minapolitan, program dan kegiatan yang menjadi layanan SKPD di diharapkan mampu membangkitkan aktivitas di sektor perikanan di Kota Pontianak dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku ekonomi di bidang kelautan dan perikanan.

2. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan di Kota Pontianak masih dihadapkan pada beberapa isu aktual dan strategis yaitu :

1. Lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian
3. Akses pemasaran hasil pertanian dan permodalan masih terbatas
4. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian
5. Keterbatasan sarana dan prasarana peternakan
6. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Peternakan
7. Tingginya tuntutan masyarakat akan bahan pangan yang ASUH yang masih belum diimbangi dengan keterjaminan akan bahan pangan yang ASUH.
8. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
9. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM perikanan
10. Tingkat konsumsi ikan di Kota Pontianak yang belum diimbangi dengan kecukupan akan produksi ikan di Kota Pontianak.
11. Masih luasnya lahan kritis
12. Belum tertibnya peredaran hasil hutan
13. Belum adanya PAD dari sektor kehutanan

a. Analisa Lingkungan Strategis

1) Analisis Eksternal

Analisis ini bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, faktor – faktor peluang dan tantangan dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

a) Peluang :

1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bahan pangan sehat dan ASUH

2. Pertumbuhan jumlah penduduk
3. Terbukanya kemitraan dengan pelaku usaha
4. Segmen pasar untuk produk – produk pertanian, peternakan dan perikanan masih terbuka luas
5. Inovasi teknologi baru dari berbagai jenis dan sumber
6. Adanya dukungan dan kerjasama dengan instansi lain
7. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan bidang pertanian, perikanan dan Kehutanan

b) Tantangan :

1. Beralihnya fungsi lahan pertanian ke non-pertanian
2. Peran swasta dalam mendukung program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah
3. Rendahnya kepemilikan aset pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan untuk akses ke perbankan
4. Lemahnya modal usaha petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan serta pelaku usaha.
5. Masuknya produk impor yang membuat produk pertanian, perikanan dan kehutanan tidak mampu bersaing
6. Adanya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), Hama dan Penyakit Ikan, Penyakit Menular strategis pada hewan, dan iklim yang tidak menentu
7. Harga saprodi cenderung mahal saat dibutuhkan dan produk pertanian cenderung murah pada saat panen
8. Kota Pontianak merupakan salah satu wilayah yang tidak memiliki Wilayah Pengelolaan Perikanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan tangkap

2) Analisis Internal

Secara garis besar, tinjauan internal bertujuan untuk memahami diri, memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi dan modal pembangunan. Kesadaran akan potensi diri serta kelemahan yang dimiliki kan memberikan arah yang jelas terhadap perbaikan dan eksploitasi apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Berdasarkan deskripsi kondisi dan isu-isu strategis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak sebagai berikut:

a) Kekuatan

1. Ketersediaan dana yang diperoleh oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan baik dana yang bersumber dari alokasi APBD, APBD Provinsi dan APBN yang sangat membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kualitas aparatur dalam aspek tingkat pendidikan dan pengalaman kerja cukup memadai.
3. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
4. Ketersediaan Produk Hukum Penunjang Pelayanan SKPD.

b) Kelemahan

1. Rendahnya ratio ketersediaan aparatur di Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terhadap masyarakat yang dilayani.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk dapat menyelenggarakan pelayanan secara optimal.
3. Minimnya penguasaan teknologi di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan (budidaya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran).
4. Belum tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dialokasikan.
5. Distribusi pegawai beberapa UPT masih belum seimbang.
6. Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan kurang memadai.
7. Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana yang tersedia kurang akurat.

3) Analisa SWOT

Berdasarkan analisis eksternal dan internal sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dilakukan SWOT analisis dalam rangka memetakan strategi untuk memaksimalkan peluang berdasarkan kekuatan yang ada serta strategi untuk mereduksi berbagai kelemahan dan ancaman yang dihadapi, sebagaimana tertuang dalam matrik berikut ini.



Tabel. III.1.
Matriks Analisa SWOT

<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan dana 2. Kualitas Aparatur (tingkat pendidikan dan pengalaman) kerja cukup memadai 3. Adanya Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah DPPK 4. Ketersediaan produk hukum penunjang pelayanan SKPD 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya ratio ketersediaan aparatur terhadap masyarakat yang dilayani 2. Keterbatasan sarana dan prasarana 3. Minimnya penguasaan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan (pra dan pasca panen). 4. Belum tercapainya target PAD SKPD 5. Distribusi pegawai beberapa UPT masih belum seimbang 6. SIM (Sistem Informasi Manajemen) kurang memadai 7. Inventarisasi sarana dan prasarana yang tersedia kurang akurat
<p style="text-align: center;">PELUANG (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bahan pangan sehat dan ASUH 2. Pertumbuhan jumlah penduduk 3. Terbukanya kemitraan dengan pelaku usaha 4. Segmen Pasar masih terbuka luas 5. Inovasi teknologi baru dari berbagai jenis dan sumber 6. Adanya dukungan dan kerjasama dengan instansi lain 7. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan bidang pertanian, perikanan dan Kehutanan 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan adanya ketersediaan dana dapat membuka peluang inovasi teknologi baru 2. Memanfaatkan Kualitas aparatur untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahan pangan yang sehat dan asuh, membuka peluang pasar dan kemitraan dengan berbagai pihak (baik swasta maupun instansi pemerintah horizontal dan vertikal) yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan 3. Ketersediaan produk hukum penunjang pelayanan SKPD membantu menentukan kebijakan Pemerintah Kota Pontianak dalam mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan 	<p style="text-align: center;">STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah penduduk dapat mengatasi minimnya penguasaan teknologi dalam pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan melalui program-program kegiatan yang padat karya 2. Terbukanya kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak dapat mengatasi rendahnya rasio ketersediaan aparatur dalam melayani masyarakat dan distribusi pegawai yang kurang seimbang pada beberapa UPT 3. Kebijakan Pemerintah yang sesuai dan dapat mendorong pencapaian target PAD dan peningkatan efektivitas 4. Inovasi teknologi baru yang dapat menjamin akurasi SIM (Sistem Informasi Manajemen) inventarisasi sarana dan prasarana

TANTANGAN (T)	STRATEGI (S-T)	STRATEGI (W-T)
<ol style="list-style-type: none"> Beralihnya fungsi lahan pertanian ke non-pertanian Peran swasta dalam mendukung program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah Rendahnya kepemilikan aset pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan untuk akses ke perbankan Lemahnya modal usaha petani/pelaku usaha Masuknya produk impor yang membuat produk pertanian, perikanan dan kehutanan tidak mampu bersaing Adanya gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), Hama dan Penyakit Ikan, Penyakit Menular strategis pada hewan, dan iklim yang tidak menentu Harga sapirodi cenderung mahal saat dibutuhkan dan produk pertanian cenderung murah pada saat panen Kota Pontianak merupakan salah satu wilayah yang tidak memiliki Wilayah Pengelolaan Perikanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha perikanan tangkap 	<ol style="list-style-type: none"> Ketersediaan dana dapat membantu pelaku usaha mengatasi gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), Hama dan Penyakit Ikan, Penyakit Menular strategis pada hewan, dan iklim yang tidak menentu serta membantu petani menyediakan sapirodi untuk menjaga stabilitas harga produk pertanian, perikanan, dan peternakan Ketersediaan dana dapat membantu pelaku usaha perikanan tangkap untuk meningkatkan skala usahanya Produk hukum penunjang pelaksanaan pelayanan SKPD diharapkan dapat mengatasi alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian Produk hukum penunjang pelaksanaan pelayanan SKPD juga dapat membatasi masuknya produk impor baik legal maupun illegal yang membuat produk pertanian, perikanan dan kehutanan tidak mampu bersaing Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah DPPK mengatur tugas pokok dan fungsi Dinas untuk memfasilitasi kerjasama dan kemitraan dalam rangka pemenuhan permodalan. 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan rasio ketersediaan aparatur terhadap masyarakat yang dilayani untuk memberikan pembinaan bagi pelaku usaha dalam mengatasi gangguan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), Hama dan Penyakit Ikan, Penyakit Menular strategis pada hewan, dan iklim yang tidak menentu Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengatasi ketidakstabilan harga sapirodi Meningkatkan penguasaan teknologi pertanian, perikanan, dan peternakan sehingga dapat menambah daya saing produk lokal Mengoptimalkan pencapaian target PAD dengan meningkatkan peran swasta di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan



4.1. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Pontianak, maka visi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak 2014 – 2019 adalah:

**"PELAKU USAHA PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN SEJAHTERA
KUALITAS PANGAN TERJAMIN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN TERJAGA"**

Makna dari visi tersebut sebagai berikut :

Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Sejahtera mengandung pengertian bahwa pelaku usaha di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak akan mengalami perkembangan perekonomian yang lebih baik yang dapat diukur dari peningkatan produksi dan produktivitas serta tingkat pendapatannya.

Kualitas Pangan Terjamin mengandung pengertian bahwa proses produksi untuk menghasilkan produk pangan tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya, tidak mengandung cemaran kimia berbahaya, cemaran mikroba dan mikro patogen, tidak kadaluwara, sehingga produk pangan yang dihasilkan bebas dari bahan-bahan berbahaya tersebut.

Kelestarian Lingkungan Terjaga bermakna bahwa aktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan yang memanfaatkan dan mendayagunaan potensi dan sumber daya alam yang ada akan dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, berkeadilan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak 2014 - 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan serta profesionalisme sumber daya aparatur.
2. Mewujudkan ketersediaan produksi dan mutu hasil pertanian yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan ketersediaan bahan pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) bagi masyarakat dan meningkatkan kesehatan hewan.
4. Mewujudkan kelestarian lingkungan dan tertib administrasi peredaran hasil hutan.
5. Mewujudkan peningkatan produksi dan hasil perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
6. Menyelenggarakan tata kelola UPTD yang profesional guna mewujudkan pelayanan publik yang optimal.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu – isu utama bidang pertanian, perikanan dan kehutanan di Kota Pontianak.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2014 - 2019 adalah :

1. Meningkatkan kapabilitas aparatur dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian.
3. Meningkatkan mutu pangan asal hewan

4. Meningkatkan ketertiban peredaran hasil hutan dan kelestarian lingkungan.
5. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan.
6. Meningkatkan pelayanan UPTD.

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2014 - 2019 adalah:

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Jangka Waktu Pelayanan SKPD

2. Meningkatkan kapabilitas SDM Aparatur

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase peningkatan jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan

3. Meningkatkan Pengelolaan Perencanaan Kerja, Monitoring dan Evaluasi serta Keuangan dan Aset secara tertib dan teratur.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan
- b) Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan pengelolaan aset

4. Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan
 - Padi
 - Ubi Kayu
 - Keladi

b) Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura :

1). Sayuran

- Sawi

- Bayam

- Kangkung

2). Buah-buahan

- Pepaya

3). Biofarmaka

- Lidah Buaya

5. Meningkatkan ketersediaan pangan hewani yang ASU (Aman, Sehat Utuh) dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

a) Persentase peningkatan ketersediaan pangan hewani yang ASU (Aman, Sehat Utuh) dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

6. Menurunkan Kasus Penyakit Hewan dan Ternak

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

a) Persentase Penurunan Kasus Kejadian Penyakit Hewan dan Ternak

7. Menurunkan Luas Lahan Kritis

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

a) Persentase penurunan luasan lahan kritis.

7. Menurunnya Peredaran Hasil Hutan yang Illegal

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

a).Persentase Penurunan Pelaku Usaha yang memanfaatkan hasil hutan illegal

8. Meningkatkan produksi hasil perikanan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

a) Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya

- ikan lele

- ikan nila

- ikan mas

9. Mengoptimalkan fungsi UPTD Agribisnis, RPH Sapi dan Pangkalan Pendaratan Ikan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

a) Persentase Peningkatan Kepuasan Pengunjung UPTD Agribisnis

b) Persentase Peningkatan Retribusi di UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

- c) Persentase Peningkatan Retribusi di UPTD Rumah potong Hewan Sapi (RPH Sapi)

Keterkaitan (interelasi) visi, misi, tujuan dan sasaran ditampilkan pada Tabel IV.1.

TABEL IV.1
KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA PONTIANAK

VISI : PELAKU USAHA PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN SEJAHTERA, KUALITAS PANGAN TERJAMIN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN TERJAGA

MISI I : Mewujudkan Profesionalisme Aparatur yang Beretos Kerja Tinggi Menuju Pelayanan Publik yang Prima.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan Kapabilitas Aparatur dan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka Waktu Pelayanan SKPD (Tahun)	1	1	1	1	1
	Meningkatkan kapabilitas SDM Aparatur	Persentase Peningkatan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan (%)	25,00	25,00	50,00	50,00	62,50
	Meningkatkan Pengelolaan Perencanaan Kerja dan Monitoring dan evaluasi serta Keuangan dan Aset secara tertib dan teratur	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan (Dokumen)	14	14	14	14	14
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan pengelolaan aset (Dokumen)	6	6	6	6	6

MISI II : Mewujudkan Ketersediaan Produksi dan Mutu Hasil Pertanian yang Berkelanjutan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Pertanian	Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%)					
		- Padi	6.95	0.05	0.05	0.05	0.05
		- Ubi Kayu	0.61	0.76	0.80	0.85	0.90
		- Keladi	1.00	0.99	0.98	0.97	0.96
		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (%)					
		a. Sayuran					
	-Sawi	2.65	2.77	3.07	3.45	4.37	

		-Bayam	11.72	11.74	11.78	11.82	11.88
		-Kangkung	2.51	3.06	3.86	4.00	4.13
		b. Buah-buahan					
		- Pepaya	0.06	0.11	0.17	0.20	0.25
		c. Biofarmaka					
		- Lidah Buaya	5.56	5.57	5.59	5.60	5.60

MISI III: Mewujudkan Ketersediaan Bahan Pangan yang ASUH bagi Masyarakat dan Meningkatkan Kesehatan Hewan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan Mutu Pangan Asal Hewan	Meningkatkan ketersediaan pangan hewani yang ASU (Aman, Sehat Utuh) dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Persentase peningkatan ketersediaan pangan hewani yang ASU (Aman, Sehat Utuh) dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) (%)					
		- Daging Sapi	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		- Daging Ayam	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		- Daging Kambing	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		- Daging Babi	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	- Daging Itik	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	Menurunkan Kasus Penyakit Hewan dan Ternak	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Penyakit Hewan dan Ternak (%)	2.13	2.17	2.22	2.27	2.33

Misi IV. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan dan Tertib Administrasi Peredaran Hasil Hutan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan Ketertiban Peredaran Hasil Hutan dan Kelestarian Lingkungan	Menurunkan Luas Lahan Kritis	Persentase Penurunan Luasan Lahan Kritis (%)	0.26	0.27	0.32	0.38	0.43
	Menurunkan Peredaran Hasil Hutan yang Ilegal	Persentase Penurunan Pelaku Usaha yang memanfaatkan hasil hutan ilegal (%)	2.86	2.94	3.03	3.13	3.23

Misi V : Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Hasil Perikanan Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan	Meningkatkan produksi hasil perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)					
		- Ikan Lele	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
		- Ikan Mas	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		- Ikan Nila	2.94	5.00	5.00	5.00	5.00

Misi VI : Menyelenggarakan Tata Kelola UPTD yang Profesional Guna Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan Pelayanan UPTD	Mengoptimalkan Fungsi UPTD Agribisnis, RPH Sapi dan Pangkalan Pendaratan Ikan	Persentase Peningkatan Kepuasan Pengunjung (%)	1.85	1.94	1.95	2.03	2.11
		Persentase Peningkatan Retribusi di UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (%)	0.00	5.00	5.10	5.30	5.50
		Persentase Peningkatan Retribusi di UPTD Rumah potong Hewan Sapi (RPH Sapi) (%)	-32.14	5.89	5.56	5.25	5.00

4.3. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat strategi Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak adalah:

1. Sasaran 1: Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Strategi : Optimalisasi penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana dan bangunan gedung lainnya.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai.

2. Sasaran 2: Meningkatkan kapabilitas SDM Aparatur

Strategi : Penguatan kapasitas sumberdaya aparatur dinas

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan.
- b) Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*)

3. Sasaran 3: Meningkatkan Pengelolaan Perencanaan Kerja, Monitoring dan Evaluasi serta Keuangan dan Aset secara tertib dan teratur.

Strategi:

- a) Optimalisasi penyusunan rencana program dan kegiatan dinas yang didasari oleh data dan informasi yang akurat.
- b) Optimalisasi penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset dinas dalam rangka mendukung IPM Kota Pontianak.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Melaksanakan peningkatan dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi dinas melalui satu pintu, yang di update secara teratur dan tepat waktu sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan serta monev agar lebih efektif, efisien dan akuntabel.

4. Sasaran 4: Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Strategi:

- a). Peningkatan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan penerapan teknologi pertanian.
- b). Optimalisasi penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Menyediakan penganggaran yang cukup untuk setiap program dan kegiatan.
- b) Menyediakan produk hukum yang cukup dan sesuai kebutuhan
- c) Menyediakan kualitas aparatur/petugas teknis pertanian.
- d) Mempertahankan dan memanfaatkan Kawasan Agribisnis dan Ruang Terbuka Hijau.
- e) Pengembangan pasca panen, pemasaran, promosi, investasi, informasi pasar, standarisasi mutu pangan segar dan olahan hasil pertanian.

5. Sasaran 5: Meningkatkan ketersediaan pangan hewani yang ASU (Aman, Sehat Utuh) dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)

Strategi: Peningkatan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan penerapan teknologi dalam penyediaan bahan pangan hewani yang ASUH serta meningkatkan pengawasan peredaran hewani.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Menyediakan penganggaran yang cukup untuk setiap program.

- b) Memfasilitasi peningkatan kualitas produk bagi pelaku usaha pemotongan dan pengolahan hasil ternak.
- c) Pengembangan Kawasan Usaha Ternak (KUNAK)

6. Sasaran 6 : Menurunkan Kasus Penyakit Hewan dan Ternak

Strategi : Melakukan kegiatan preventif dan penanganan kasus penyakit hewan dan ternak

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Persentase Penurunan Kasus Kejadian Penyakit Hewan dan Ternak

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a). Menyiapkan produk hukum tentang upaya penurunan kasus penyakit hewan dan ternak.
- b). Meningkatkan sinergisitas antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Pusat

7. Sasaran 7: Menurunkan luas lahan kritis

Strategi: Melakukan gerakan penghijauan menggunakan tanaman MPTS

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Menyediakan penganggaran yang cukup untuk gerakan penghijauan

8. Sasaran 8 : Menurunnya Peredaran Hasil Hutan yang Illegal

Strategi: Menyiapkan peraturan terkait dengan pembatasan peredaran atau penjualan hasil hutan, melakukan pengawasan peredaran hasil hutan melalui tertib administrasi jumlah dan dokumen asal hasil hutan serta melakukan kerjasama antar daerah terutama daerah asal hasil hutan.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a). Menyiapkan produk hukum tentang peredaran hasil hutan di Kota Pontianak.
- b) Meningkatkan sinergisitas antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Pusat.

9. Sasaran 9: Meningkatkan produksi hasil perikanan

Strategi :

- a) Mengatasi keterbatasan Wilayah Pengelolaan Perikanan dengan meningkatkan kapabilitas pelaku usaha perikanan tangkap dan sarana/prasarana usahanya.
- b) Menumbuhkembangkan kecintaan dan pemahaman akan Kelautan dan Perikanan bagi masyarakat Kota Pontianak agar dapat meningkatkan konsumsi ikan.
- c) Menyediakan sarana/prasarana untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- d) Berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dan lingkungan produksi Kelautan dan Perikanan.
- e) Mengembangkan dan meningkatkan peran dan fungsi BBI Lokal sebagai pusat informasi, penyediaan benih dan penyebaran teknologi perbenihan yang baik.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi, yaitu:

- a) Pengembangan Kawasan Minapolitan
- b) Peningkatan Kesejahteraan Petani (PKN)
- c) Meningkatkan kapabilitas SDM kelautan dan perikanan
- d) Pengembangan kemitraan dan partisipasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan
- e) Meningkatkan kualitas lingkungan dan produk Kelautan dan Perikanan

10. Sasaran 10: Mengoptimalkan fungsi UPTD Agribisnis, RPH Sapi dan Pangkalan Pendaratan Ikan.

Strategi: Mengoptimalkan pelayanan di UPTD Agribisnis, Pangkalan Pendaratan Ikan dan RPH Sapi melalui penyediaan sarana/prasarana yang cukup dan memadai dalam rangka menjamin ketersediaan bahan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal. .

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

- a) Meningkatkan kinerja aparatur/petugas teknis UPTD.
- b) Monitoring dan evaluasi aktivitas pendaratan ikan di UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan dan RPH Sapi.



Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak yang direncanakan untuk Periode Tahun 2015 – 2019 meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

Indikator kinerja:

- Jangka waktu pelayanan

Kegiatan:

a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator Keluaran (*Output*): Jangka Waktu Ketersediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik (1 tahun)

Kelompok Sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD.

b) Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator Keluaran (*Output*): Jangka waktu penyediaan alat tulis kantor (1 tahun)

Kelompok Sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD.

c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator Keluaran (*Output*): Jangka waktu ketersediaan barang cetakan dan penggandaan (1 tahun).

Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD

d) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Keluaran (*Output*): Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (1 tahun).

Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD

e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (paket).

Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD

f) Penyediaan Makanan dan Minuman

Indikator Keluaran (*Output*): Jangka Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu (1 tahun).

Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD

g) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Indikator Keluaran (Output): Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (kali).

Kelompok sasaran: SDM aparatur

h) Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Tenaga Pengelola Keuangan (ob)

Kelompok Sasaran: SDM aparatur

i) Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Tenaga Cleaning Service dan Pengamanan/Penjaga Malam (paket)

Kelompok Sasaran: SDM aparatur

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan kesejahteraan aparatur.

Indikator kinerja:

- Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara.

Kegiatan:

a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator Keluaran (Output): Jumlah perlengkapan Gedung Kantor (jenis)

Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD

b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Indikator Keluaran (Output): Jumlah pengadaan peralatan Gedung Kantor (jenis)

Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD

c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Indikator Keluaran (Output): Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit).

Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Indikator Keluaran (Output): Jangka waktu Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara (bulan)

Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD

e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Indikator Keluaran (Output): Jangka Waktu Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara (bulan)

Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD

f) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Indikator Keluaran (Output): Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional (unit)

Kelompok sasaran: SDM aparatur

g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Indikator Keluaran (Output): Jangka Waktu pemeliharaan Gedung Kantor (bulan).

Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya disiplin pegawai dalam berpakaian

Indikator kinerja:

- Jumlah pegawai yang disiplin berpakaian

Kegiatan:

a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Indikator Keluaran (Output): Jumlah pengadaan pakaian dinas (stel)

Kelompok sasaran: SDM aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya Kinerja Aparatur.

Indikator Kinerja:

- Jumlah diklat yang diikuti

Kegiatan:

a) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti (kali)

Kelompok sasaran: SDM aparatur

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

Indikator Kinerja:

- Jumlah dokumen pelaporan

Kegiatan:

a) Penyusunan Rencana Kerja

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen rencana kerja (dokumen).

Kelompok sasaran: SDM aparatur

b) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

Indikator Keluaran (Output): Jumlah pelaporan capaian kinerja SKPD (dokumen).

Kelompok sasaran: SDM aparatur

c) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Indikator Keluaran (Output): Jumlah pelaporan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (dokumen).

Kelompok sasaran: SDM aparatur

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
Hasil (*Outcome*): Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan keuangan
Indikator Kinerja:
 - Jumlah dokumen pelaporanKegiatan:
 - a) Penyusunan Laporan Keuangan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah laporan keuangan (dokumen).
Kelompok sasaran: SDM aparatur

7. Program Peningkatan Pelayanan Prima
Hasil (*Outcome*): Meningkatnya pelayanan prima
Indikator Kinerja:
 - Jumlah dokumen pelaporanKegiatan:
 - a) Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Indikator Keluaran (Output): Jumlah laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (dokumen).
Kelompok sasaran: SDM aparatur
 - b) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Indikator Keluaran (Output): Jumlah SOP yang disusun (dokumen).
Kelompok sasaran: SDM aparatur

8. Program Pengembangan Data/Informasi
Hasil (*Outcome*): Meningkatnya pengembangan data/informasi
Indikator Kinerja:
 - Jumlah dokumenKegiatan:
 - a) Penyusunan Data dan Profil SKPD
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen data dan profil SKPD
Kelompok sasaran: masyarakat umum
 - b) Penyusunan Kompilasi Data Bidang Pertanian Perikanan dan Kehutanan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen kompilasi data bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan profil SKPD
Kelompok sasaran: masyarakat umum

9. Program Pengembangan Sistem Informasi
Hasil (*Outcome*): Meningkatnya pengembangan sistem informasi
Indikator Kinerja:
 - Jumlah publikasi dan dokumen

Kegiatan:

- a) Pembuatan Sistem Informasi

Indikator Keluaran (*Output*): Tersedianya sistem informasi dinas (paket)

Kelompok sasaran: masyarakat umum

- b) Pengelolaan Website

Indikator Keluaran (*Output*): Jangka waktu pengelolaan website (bulan)

Kelompok sasaran: masyarakat umum

10. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada Pangan

Hasil (*Outcome*): Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada pangan

Indikator kinerja:

- Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, keladi)

Kegiatan:

- a) Pemantauan, Pengamatan, Peramalan, dan Pengendalian Serangan OPT dan DFI Tanaman Pangan

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah Pemantauan, Pengamatan, Peramalan, dan Pengendalian Serangan OPT dan DFI Tanaman Pangan (kali).

Kelompok sasaran: petani

- b) Fasilitasi untuk Mendukung Program Peningkatan Produksi Beras Nasional

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah Pengadaan Fasilitas untuk Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (paket).

Kelompok sasaran: masyarakat umum

- c) Sosialisasi Program dan Kegiatan Pertanian

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah pelaksanaan sosialisasi program dan kegiatan penilaian (kali)

Kelompok sasaran: masyarakat umum

- d) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pertanian

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan pertanian (kali).

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

- e) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dalam rangka Mendukung Produksi Pangan

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah sarana prasarana pertanian (paket).

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

11. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya produktivitas tanaman hortikultura

Indikator kinerja:

- Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (sayuran: sawi, bayam, kangkung; buah-buahan: papaya; biofarmaka: lidah buaya)

Kegiatan:

- a) Pengembangan Bibit/Benih Buah-buahan
Indikator Keluaran (*Output*): Tersedianya Bibit/Benih Buah-buahan (paket)
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
- b) Pengembangan Bibit/Benih Florikultura
Indikator Keluaran (*Output*): Tersedianya Bibit/Benih Florikultura (paket)
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
- c) Pengembangan Bibit/Benih Sayuran dan Biofarmaka
Indikator Keluaran (*Output*): Tersedianya Bibit/Benih Sayuran dan Biofarmaka (paket)
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
- d) Penerapan GAP/SOP
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah kelompok yang menerapkan GAP/SOP (kelompok)
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
- e) Pengembangan Kawasan Hortikultura
Indikator Keluaran (*Output*): Luas Tanaman Hortikultura (Ha)
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
- f) Penyediaan Sarana Produksi Tanaman Hortikultura
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah Sarana dan Prasarana Produksi Hortikultura (paket)
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
- g) Dukungan Manajemen Teknis Lainnya
Indikator Keluaran (*Output*): Jangka waktu penyediaan manajemen teknis (tahun)
Kelompok sasaran: masyarakat umum.

12. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Hasil (*Outcome*): Menyediakan dan mengembangkan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Indikator kinerja:

- Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman pangan
- Persentase Peningkatan Produktivitas tanaman hortikultura

Kegiatan:

- a) Perluasan Areal Tanam dan Pengolahan Lahan
Indikator Keluaran (*Output*): Panjang Jalan Usaha Tani (Km)
Kelompok sasaran: petani dan masyarakat umum.
- b) Pengelolaan Air di Tingkat Usaha Tani
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah prasarana irigasi tanah dangkal (paket)
Kelompok sasaran: petani dan masyarakat umum.

- c) Pengawasan dan Optimalisasi Pupuk dan Pestisida Berimbang
Indikator Keluaran (*Output*): Terlaksananya kegiatan pengawasan penyaluran pupuk yang bersubsidi dan pestisida (paket)
Kelompok sasaran: masyarakat perdesaan.

13. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, Ekspor Produksi Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang produktif

Indikator kinerja:

- Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha pertanian yang produktif

Kegiatan:

- a) Pelatihan/Sosialisasi/Pertemuan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Panen
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah pelaku usaha yang mendapat pelatihan pasca panen (kelompok)
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
- b) Penguatan Kelompok Pengolahan Hasil
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah dan jenis sarana prasarana pengolahan hasil yang akan diserahkan ke masyarakat (paket)
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
- c) Pembinaan dan Pengembangan Produk Olahan Pertanian
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah pelaku usaha hasil pertanian yang mendapatkan pembinaan (kelompok)
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
- d) Pembinaan Kelembagaan dan Informasi Pasar
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah laporan informasi pasar (dokumen)
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
- e) Pengembangan Pemasaran, Promosi dan Investasi Agribisnis
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah pameran yang diikuti (paket).
Kelompok sasaran: masyarakat umum
- f) Pengembangan Pasca Panen dan Sarana Usaha Pengolahan
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah dan jenis pengadaan sarana pasca panen dan pengolahan (paket).
Kelompok sasaran: masyarakat umum
- g) Pengembangan Standarisasi dan Penerapan Mutu Pangan Segar dan Olahan Hasil Pertanian
Indikator Keluaran (*Output*): Tersedianya sarana dan prasarana standarisasi dan penerapan mutu (paket).
Kelompok sasaran: masyarakat umum
- h) Penyebaran Informasi Produk Pertanian

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah materi informasi produk pertanian (paket).

Kelompok sasaran: masyarakat umum

14. Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat dan Halal

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya ketersediaan pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh (ASU) dan Aman, Sehat, Utuh dan Sehat (ASUH)

Indikator kinerja:

- Persentase peningkatan ketersediaan pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh (ASU) dan Aman, Sehat, Utuh dan Sehat (ASUH)

a) Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah kelompok penerima bantuan bibit ternak (kelompok)

Kelompok sasaran: kelompok ternak.

b) Pendataan Peternakan

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah dokumen pendataan ternak (dokumen)

Kelompok sasaran: pelaku usaha peternakan.

15. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya penerapan teknologi peternakan

Indikator kinerja:

- Jumlah Kelompok ternak yang masuk KUNAK

Kegiatan:

a) Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK)

Indikator Keluaran (*Output*): Persentase penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang disediakan (%)

Kelompok sasaran: kelompok ternak.

16. Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengolahan Hasil Peternakan

Hasil (*Outcome*): Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Peternakan yang dibina (kelompok)

Indikator kinerja:

- Jumlah Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Peternakan yang dibina (kelompok)

Kegiatan:

a) Bimbingan dan Peningkatan Kualitas Pengolahan Hasil Peternakan

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kualitas pengolahan hasil peternakan (kali).

Kelompok sasaran: pelaku usaha peternakan.

17. Program Peningkatan Keamanan Pangan Produk Hewan

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya pemahaman masyarakat akan keamanan pangan produk hewan (persen kuisisioner)

Indikator kinerja:

- Jumlah kelompok pengolah hasil peternakan yang dibina

Kegiatan :

- a) Sosialisasi dan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah sosialisasi dan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan (kali)

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

- b) Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Unggas

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Pemotongan Unggas (ekor)

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

- c) Sertifikasi Pemotong Sapi

Indikator Keluaran (Output): Jumlah pemotong sapi yang mendapat sertifikat (orang)

Kelompok sasaran: pemotong sapi.

- d) Sertifikasi Pemotong Unggas

Indikator Keluaran (Output): Jumlah pemotong unggas yang mendapat sertifikat (orang)

Kelompok sasaran: pemotong unggas

- e) Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah pembinaan dan pengawasan pemotongan pada hari raya keagamaan (kali)

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

18. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Hasil (*Outcome*): Penurunan kasus kejadian penyakit hewan dan ternak

Indikator kinerja:

- Persentase Penurunan kasus kejadian penyakit hewan dan ternak

Kegiatan:

- a) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Indikator Keluaran (Output): Jumlah pelaksanaan penanganan kasus penyakit menular ternak (kali)

Kelompok sasaran: Petugas pengelola persampahan.

19. Program Rehabilitasi Hutan dan Pengembangan Hutan Tanaman

Hasil (*Outcome*): Berkurangnya Luasan Lahan Kritis (Ha)

Indikator kinerja:

- Persentase Penurunan Luasan Lahan Kritis

Kegiatan:

- a) Penghijauan

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah bibit tanaman MPTS yang diserahkan kepada masyarakat (paket)

Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD.

20. Program Tertib Penataan Hasil Hutan

Hasil (*Outcome*): Penurunan pelaku usaha yang memanfaatkan hasil hutan illegal

Indikator kinerja:

- Persentase penurunan pelaku usaha yang memanfaatkan hasil hutan illegal

Kegiatan:

a) Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah dokumen pengawasan tertib peredaran hasil hutan (dokumen)

Kelompok sasaran: SDM aparatur.

21. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Tangkap

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya produksi perikanan tangkap

Indikator kinerja:

- Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap

Kegiatan:

a) Pembinaan Teknis Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang dibina (orang)

Kelompok sasaran: pelaku usaha perikanan tangkap

b) Pemantauan dan Pembinaan Teknis Kelompok Usaha Bersama (KUB) Penerima Paket Bantuan Perikanan Tangkap

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pembinaan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUB) penerima paket bantuan perikanan tangkap (kali)

Kelompok sasaran: kelompok usaha bersama penerima paket bantuan.

c) Pengembangan dan Peningkatan Usaha Perikanan Tangkap

Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap penerima paket bantuan (kelompok)

Kelompok sasaran: kelompok pelaku usaha perikanan tangkap.

d) Peningkatan Pemahaman dan Kecintaan terhadap Kelautan dan Perikanan pada Masyarakat Kota Pontianak

Indikator Keluaran (*Output*): Terlaksananya kegiatan pameran/promosi penumbuhan kecintaan terhadap kelautan dan perikanan pada masyarakat Kota Pontianak (kali)

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

22. Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah serta Pemasaran Produk Hasil Perikanan

Hasil (*Outcome*): Peningkatan jumlah kelompok pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang dibina

Indikator kinerja:

- Persentase peningkatan jumlah kelompok pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang dibina

Kegiatan:

- a) Bimbingan Teknis Pemanfaatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan serta Manajemen Usaha kepada Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan Calon Penerima Paket Bantuan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pelatihan bagi kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan calon penerima paket bantuan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (kali)

Kelompok sasaran: kelompok pengolah dan pemasar penerima paket bantuan.

- b) Apresiasi Pengembangan dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah apresiasi pengembangan dan peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan (kali)

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

- c) Pengembangan dan Peningkatan Konsumsi Ikan Melalui Inovasi Menu dan Lomba Masak Berbahan Utama Ikan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah pelaksanaan lomba inovasi menu dan lomba masak berbahan utama ikan (kali)

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

- d) Peningkatan Kompetensi Petugas dan Pengolah Hasil Perikanan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah bimbingan teknis/pelatihan/magang yang diikuti/dilaksanakan (kali)

Kelompok sasaran: Petugas teknis dan pelaku usaha pengolah hasil perikanan.

- e) Promosi Produk Hasil Perikanan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah promosi/pameran yang diikuti/dilaksanakan

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

- f) Pembinaan serta Penghimpunan Informasi Harga Pasar Produk Perikanan Konsumsi dan Non Konsumsi

Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen informasi harga pasar produk perikanan konsumsi dan non konsumsi yang dihasilkan (dokumen)

Kelompok sasaran: pelaku pemasar produk perikanan konsumsi dan non konsumsi.

- g) Penyelenggaraan Pameran dan Promosi Ikan Hias

Indikator Keluaran (Output): Jumlah pameran/promosi ikan hias yang dilaksanakan (kali)

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

- h) Pengembangan dan Pelayanan Raiser Ikan Hias

Indikator Keluaran (Output): Jumlah kunjungan pada Raiser Ikan Hias (orang)

Kelompok sasaran: masyarakat umum.

i) Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Indikator Keluaran (Output): Jumlah paket bantuan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran (paket)

Kelompok sasaran: pengolah dan pemasar hasil perikanan.

23. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan Budidaya

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya

Indikator kinerja:

- Persentase peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya (ikan lele, ikan mas dan ikan nila)

Kegiatan:

a) Pemantauan dan Pembinaan Cara Budidaya dan Perbenihan Ikan yang Baik (CBIB-CPIB)

Indikator Keluaran (Output): Jumlah pemantauan dan pembinaan cara budidaya dan Perbenihan Ikan yang Baik (CBIB-CPIB) (kali)

Kelompok sasaran: pelaku usaha perikanan budidaya dan perbenihan.

b) Pengembangan dan Peningkatan Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar

Indikator Keluaran (Output): Jumlah paket bantuan Pengembangan dan Peningkatan Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar (paket)

Kelompok sasaran: pelaku usaha perikanan budidaya dan perbenihan.

c) Pemantauan dan Pembinaan Teknis Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Penerima Paket Bantuan Perikanan Budidaya

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Pemantauan dan Pembinaan Teknis Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Penerima Paket Bantuan Perikanan Budidaya (kali)

Kelompok sasaran: Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Penerima Paket Bantuan Perikanan Budidaya.

d) Pemantauan dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan dan Residu di Kawasan Perikanan Budidaya

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Pemantauan dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan dan Residu di Kawasan Perikanan Budidaya (kali)

Kelompok sasaran: unit usaha perikanan budidaya.

e) Sosialisasi Cara Pencegahan dan Penanganan Hama Penyakit Ikan pada Usaha Perikanan Budidaya

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Sosialisasi Cara Pencegahan dan Penanganan Hama Penyakit Ikan pada Usaha Perikanan Budidaya (kali) Kelompok sasaran: pelaku usaha perikanan budidaya.

24. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Fungsi BBI Lokal

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya produksi benih komoditas air tawar.

Indikator kinerja:

- Persentase peningkatan jumlah produksi benih komoditas air tawar (ikan nila, ikan mas, ikan lele)

Kegiatan:

- a) Pengadaan Pakan, Vitamin, Probiotik dan Obat-obatan Ikan untuk Mendukung Pengembangan Induk Ikan Unggul dan Benih Ikan Unggul
Indikator Keluaran (Output): Jumlah Pengadaan Pakan, Vitamin, Probiotik dan Obat-obatan Ikan untuk Mendukung Pengembangan Induk Ikan Unggul dan Benih Ikan Unggul (paket)
Kelompok sasaran: BBI Lokal.
- b) Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana BBI Lokal serta Fungsi Laboratorium
Indikator Keluaran (Output): Jumlah produksi benih ikan air tawar unggul (paket)
Kelompok sasaran: BBI Lokal.
- c) Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Fungsi BBI Lokal dan Laboratorium
Indikator Keluaran (Output): Jangka waktu Pelayanan BBI Lokal dan Laboratorium (tahun)
Kelompok sasaran: BBI Lokal.
- d) Pengembangan dan Peningkatan Mutu Jenis Komoditas Benih Ikan Unggul dan Sertifikasi CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan CPIB (Cara Perbenihan Ikan yang Baik)
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen sertifikasi CBIB dan CPIB yang dikeluarkan (dokumen)
Kelompok sasaran: pelaku usaha perikanan budidaya dan perbenihan.
- e) Pengadaan Calon Induk Ikan Unggul
Indikator Keluaran (Output): Jumlah pengadaan calon induk ikan unggul (paket)
Kelompok sasaran: BBI Lokal.
- f) Pemantauan dan Monitoring Perikanan
Indikator Keluaran (Output): Jumlah pemantauan dan monitoring perikanan.
Kelompok sasaran: masyarakat umum (kali).
- g) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi BBI Lokal
Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen data dan informasi BBI Lokal (dokumen)
Kelompok sasaran: BBI Lokal.

25. Program Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Hasil (*Outcome*): Meningkatnya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Indikator kinerja:

- Jumlah pengawasan tertib administrasi pelaku usaha kelautan dan perikanan (kali)

Kegiatan:

- a) Pemantauan dan Pengawasan dalam rangka Tertib terhadap Per UU yang berlaku pada Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap, Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah pengawasan (kali)
Kelompok sasaran: pelaku usaha perikanan
26. Program Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Hasil (*Outcome*): Meningkatnya kepuasan pengunjung UPTD Agribisnis
Indikator kinerja:
- Persentase Peningkatan kepuasan pengunjung UPTD Agribisnis
- Kegiatan:
- a) Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan UPTD Agribisnis
Indikator Keluaran (*Output*): Jangka waktu pelayanan UPTD Agribisnis
Kelompok sasaran: masyarakat umum
27. Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Fungsi UPTD PPI
Hasil (*Outcome*): Meningkatnya retribusi di UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Indikator kinerja:
- Persentase Peningkatan retribusi di UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
- Kegiatan :
- a) Pemantauan Penanganan Ikan Hasil Tangkapan dalam rangka Keamanan Pangan UPTD PPI
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah pemantauan aktivitas bongkar muat kapal perikanan di UPTD PPI (kali)
Kelompok sasaran: kapal-kapal perikanan yang bongkar muat di UPTD PPI.
- b) Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Kepelabuhan Perikanan UPTD PPI
Indikator Keluaran (*Output*): Jangka waktu pelayanan kepelabuhan perikanan UPTD PPI (tahun)
Kelompok sasaran: masyarakat umum.
- c) Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana UPTD PPI
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah pengadaan sarana prasarana UPTD PPI (paket)
Kelompok sasaran: UPTD PPI.
28. Program Penjaminan Mutu Pangan Asal Hewan
Hasil (*Outcome*): Meningkatnya retribusi di UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Sapi.
Indikator kinerja:
- Persentase peningkatan retribusi di UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Sapi
- Kegiatan:
- a) Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH) Sapi
Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah pemotongan sapi di UPTD RPH Sapi (ekor)

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Target masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam Tabel V.1 :



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
									TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
									TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)			TARGET	DANA Rp. (000)
1. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian	1. Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%) a. Padi b. Ubi kayu c. Keladi	Peningkatan sarana prasarana, kualitas SDM, dan penerapan teknologi pertanian	1. Menyediakan penganggaran yang cukup untuk setiap program dan kegiatan 2. Menyediakan produk hukum yang cukup dan sesuai kebutuhan 3. Meningkatkan kualitas aparatur/ petugas teknis pertanian		Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada Pangan	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan: a. Padi (%) b. Ubi kayu (%) c. Keladi (%)		209.820,00		132.000,00		182.000,00		184.000,00		234.000,00					
						0,00 4,14 0,00	6,95 0,61 1,00	0,05 0,76 0,99	0,05 0,80 0,98	0,05 0,85 0,97	0,05 0,90 0,96											
						0 0 0 0 0	0 0 0 4 0	6 1 2 4 1	6 1 2 4 1	6 1 2 4 1	6 1 2 4 1											
		2. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (%) Sayuran: a. Sawi b. bayam c. kangkung Buah-buahan: a. Pepaya Biofarmaka: a. Lidah Buaya	4. Mempertahankan dan memanfaatkan kawasan agrbisnis dan ruang terbuka hijau		Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (%): Sayuran: a. Sawi (%) b. bayam (%) c. kangkung (%) Buah-buahan: a. Pepaya (%) Biofarmaka: b. Lidah Buaya (%)	769.960,96		895.000,00		1.017.000,00		1.079.400,00		1.202.280,00		1.202.280,00					
					0,26 11,69 0,06	2,65 11,72 2,51	2,77 11,74 3,06	3,07 11,78 3,86	3,45 11,82 4,00	4,37 11,88 4,13												
					0 0 0 0 0	1 4 0 0 0	1 2 1 1 2	1 2 1 1 2	1 2 1 1 2	1 2 1 1 2												
						Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan dan hortikultura	1. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan: a. Padi (%) b. Ubi kayu (%) c. Keladi (%) 2. Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (%): Sayuran: a. Sawi (%) b. bayam (%) c. kangkung (%) Buah-buahan: a. Pepaya (%) Biofarmaka: a. Lidah Buaya (%)	481.510,00		303.050,00		315.000,00		325.000,00		340.000,00		340.000,00				
						0,00 4,14 0,00	6,95 0,61 1,00	0,05 0,76 0,99	0,05 0,80 0,98	0,05 0,85 0,97	0,05 0,90 0,96											
						0 0 0 0 0 0 0	2 3 2	2 3 2	2 3 2	2 3 2	2 3 2											
												Program Peningkatan Nilai tambah, daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, Ekspor Produksi Hasil Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Pertanian yang Produktif (%)	0	43,48	375.184,00	9,09	614.755,70	8,33	677.500,00	7,69	735.000,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
									TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
									TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)			TARGET	DANA Rp. (000)			
						Kegiatan																			
						1. Pelatihan/Sosialisasi/Pertemuan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Panen	1. Jumlah pelatihan/sosialisasi/pertemuan pascapanen dan pengolahan hasil (kali)	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3								
						2. Penguatan Kelompok Pasca Panen/Pengolahan Hasil	2. Jumlah dan jenis sarana dan prasarana pengolahan hasil yang akan diserahkan ke masyarakat (paket)	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3								
						3. Pembinaan dan Pengembangan produk olahan pertanian	3. Jumlah pelaku usaha hasil pertanian yang mendapatkan pembinaan (kelompok)	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2								
						4. Pembinaan Kelembagaan dan informasi pasar	4. Jumlah laporan informasi pasar (dokumen)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
						5. Pengembangan Pemasaran, promosi, dan investasi agribisnis	5. Jumlah pameran yang diikuti (kali)	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5								
						6. Pengembangan pascapanen dan sarana usaha pengolahan	6. Jumlah dan jenis pengadaan sarana pascapanen dan pengolahan (paket)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
						7. Pengembangan standardisasi dan penerapan mutu pangan segar dan olahan hasil pertanian	7. Tersedianya sarana dan prasarana standarisasi dan penerapan mutu (paket)	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
						8. Penyebaran informasi produk pertanian	8. Jumlah materi informasi produk pertanian (paket)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								
Meningkatkan Mutu Pangan asal Hewan	1. Meningkatkan ketersediaan pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh (ASU) dan Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH)	1. Persentase peningkatan ketersediaan bahan pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh (ASU) dan Aman Sehat Utuh Halal (ASUH) (%) a. daging sapi b. daging ayam c. daging kambing d. daging babi e. itik	Peningkatan sarana prasarana, kualitas SDM, dan penerapan teknologi dalam penyediaan bahan pangan hewani yang ASUH serta meningkatkan pengawasan peredaran hewan	1. Menyiapkan penganggaran yang cukup untuk setiap program 2. Memfasilitasi peningkatan kualitas produk bagi pelaku 3. Mengembangkan kawasan usaha ternak (KUNAK)		Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal	Persentase peningkatan ketersediaan bahan pangan asal hewan yang Aman Sehat Utuh (ASU) dan Aman Sehat Utuh Halal (ASUH) (%) a. daging sapi (%) b. daging ayam (%) c. daging kambing (%) d. daging babi (%) e. itik (%)		41.582,00		47.819,30		54.992,20		63.241,02		72.727,18		72.727,18						
						Kegiatan:																			
						1. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	1. Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Bibit Ternak (kelompok)	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1							Seksi Peternakan Kec. Pnk Utara	
						2. Pendataan Peternakan	2. Jumlah dokumen pendataan ternak (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							Seksi Peternakan se-Kota Pnk	
						Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah Kelompok ternak yang masuk KUNAK (KUNAK)	0	1	282.485,05	1	1.757.277,50	1	1.933.005,25	1	1.159.803,15	1	1.275.783,47	1	1.275.783,47					
						Kegiatan:																			
						1. Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK)	1. Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana yang disediakan (paket)	7	3		3	3	3	3	3	3	3							Seksi Peternakan Kec. Pnk Utara	
						Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengolahan Hasil Peternakan	Jumlah Kelompok pengolah dan pemasar hasil peternakan yang dibina (kelompok)	0	0		1	33.457,80	1	36.803,58	1	40.483,94	1	44.532,33	1	44.532,33					
						Kegiatan:																			
						1. Bimbingan dan Peningkatan kualitas Pengolahan Hasil Peternakan	1. Jumlah pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kualitas pengolahan hasil peternakan (kali)	0	0		1		1		1		1		1					Seksi Peternakan se-Kota Pnk	
						Program Peningkatan Keamanan Pangan Produk Hewan	Jumlah sosialisasi dan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan (kali)	7	7	114.819,00	7	167.041,85	7	171.848,13	7	214.625,35	7	224.819,15	7	224.819,15					
						Kegiatan:																			
						1. Sosialisasi dan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan	1. Jumlah sosialisasi dan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan (kali)	7	7		7		7		7		7		7					Seksi Peternakan se-Kota Pnk	
						2. Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Unggas	2. Jumlah pemotongan unggas (ekor)	0	106.500		124.250		142.000		159.750		177.500		210.000					Seksi Peternakan Kec. Pnk Timur	
						3. Sertifikasi Pemotong sapi	3. Jumlah pemotong ternak yang mendapat sertifikat (orang)	5					5				5			5				Seksi Peternakan se-Kota Pnk	
						4. Sertifikasi Pemotong Unggas	4. Jumlah pemotong Unggas yang mendapat sertifikat (orang)				10				10									Seksi Peternakan se-Kota Pnk	
						5. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemotongan	5. Jumlah pembinaan dan pengawasan pemotongan pada hari raya keagamaan (kali)	5	5		5		5		5		5		5					Seksi Peternakan se-Kota Pnk	
						Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase Penurunan kasus kejadian penyakit hewan dan ternak (%)	0	2,13	256.296,05	2,17	281.925,66	2,22	310.118,22	2,27	341.130,04	2,33	375.243,05	2,33	375.243,05					
						Kegiatan:																			
						1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Ternak	1. Jumlah pelaksanaan Penanganan kasus penyakit menular ternak (kali)	30	29		28		26		24		22		22						Seksi Peternakan se-Kota Pnk

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN INDIKASI PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
									TAHUN - 1 2015		TAHUN - 2 2016		TAHUN - 3 2017		TAHUN - 4 2018		TAHUN - 5 2019				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SIPD	
									TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)	TARGET	DANA Rp. (000)			TARGET	DANA Rp. (000)
Meningkatkan ketertarikan peredaran hasil hutan dan kelestarian lingkungan	1. Menurunkan luas lahan kritis 2. Menurunkan Peredaran Hasil Hutan yang Illegal	1. Persentase Penurunan luasan lahan kritis (%) 2. Persentase Penurunan Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Hasil Hutan Illegal (%)	Melakukan gerakan penghijauan menggunakan tanaman MPTS dan mengawasi peredaran hasil hutan melalui tertib administrasi	1. Menyediakan penganggaran yang cukup untuk gerakan penghijauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha kehutanan di Kota Pontianak 2. Meningkatkan sinergisitas antara Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi, dan Pusat		Program Rehabilitasi Hutan dan Pengembangan Hutan Tanaman	Persentase Penurunan luasan lahan kritis (%)	0,26	0,26	91.915,00	0,27	375.000,00	0,32	431.250,00	0,38	495.937,50	0,43	570.328,13	0,43	570.328,13		
						Kegiatan:	1. Penghijauan	5640	1885	2500	3.000	3.500	4.000	4.000								
						Program Tertib Penataan Hasil Hutan	Persentase Penurunan pelaku usaha yang memanfaatkan hasil hutan ilegal (%)	1,13	2,86	27.900,00	2,94	32.085,00	3,03	36.897,75	3,13	42.432,41	3,23	48.797,27	3	48.797,27		
						Kegiatan:	1. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	18	20	25	50	60	75	75								
Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan	Meningkatkan produksi hasil perikanan	1. Persentase Peningkatan produksi perikanan hasil budidaya a. Ikan Mas b. Ikan Nila c. Ikan Lele	Mengatasi keterbatasan wilayah pengelolaan perairan dengan meningkatkan kapabilitas pelaku usaha perikanan tangkap dan sarana/prasarana usahanya Menumbuhkembangkan kecintaan dan pemahaman akan kelautan dan perikanan bagi masyarakat Kota Pontianak agar dapat meningkatkan konsumsi ikan Menyediakan sarana/prasarana untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan Berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dan lingkungan produksi kelautan dan perikanan	1. Meningkatkan kapabilitas SDM 2. Pengembangan kemitraan dan partisipasi dengan stake holders kelautan dan perikanan 4. Meningkatkan kualitas lingkungan dan produk kelautan dan perikanan 5. Pengembangan kawasan Minapolitan		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Jumlah produksi perikanan tangkap (%)	5	5	43.600,00	5	359.275,00	5,00	449.625,15	5,00	563.668,45	5,00	707.775,15	5,00	707.775,15		
						Kegiatan:	1. Pembinaan teknis pengembangan usaha perikanan tangkap	25	0	25	25	25	25	25								
						2. Pemantauan dan pembinaan teknis kelompok usaha bersama (KUB) penerima paket bantuan perikanan tangkap	0	4	4	4	4	4	4									
						3. Pengembangan dan peningkatan Usaha perikanan tangkap penerima paket bantuan (kelompok)	3	0	3	3	3	3	3									
						4. Peningkatan pemahaman dan kecintaan terhadap kelautan dan perikanan pada masyarakat Kota Pontianak	1	1	1	1	1	1	1									
						Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah serta Pemasaran Produk Hasil Perikanan	Jumlah kelompok pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang dibina (kelompok)	0	3	245.071,70	3	675.369,34	3	889.437,50	3	953.488,14	3	1.128.659,05	3	1.214.575,05		
						Kegiatan:	1. Bimbingan teknis pemanfaatan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta manajemen usaha kepada kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan calon penerima paket bantuan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1	4	68.234,10	4	78.469,22	4	90.239,60	4	90.239,60	4	90.239,60	4	90.239,60		
						2. Apresiasi pengembangan dan peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan	0	0	1	1	1	1	1									
						3. Pengembangan dan peningkatan konsumsi ikan melalui inovasi menu dan lomba masak berbahan utama ikan	1	2	2	2	2	2	2									
						4. Peningkatan kompetensi petugas dan pengolah hasil perikanan	0	0	1	2	1	2	2									
						5. Promosi produk hasil perikanan	1	0	0	1	1	1	1									
						6. Pembinaan serta penghimpunan informasi harga pasar produk perikanan konsumsi dan nonkonsumsi yang dihasilkan (dokumen)	1	1	1	1	1	1	1									
						7. Penyelenggaraan pameran dan promosi ikan hias	0	1	1	1	1	1	1									
						8. Pengembangan dan pelayanan raiser ikan hias	0	12	12	12	12	12	12									
						9. Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	0	0	4	4	4	4	4									
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Hasil Budidaya			602.110,00		962.493,90		1.269.437,69		1.678.201,18		2.226.214,64		2.226.214,64								
	b. Ikan Mas (%)	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00														
	c. Ikan Nila (%)	2	2,94	5	5,00	5,00	5,00	5,00														
	a. Ikan Lele (%)	5	5	5	5,00	5,00	5,00	5,00														
	Kegiatan:	1. Pemantauan dan Pembinaan cara budidaya dan perbenihan ikan yang baik (CBIB-CPIB)	1	0	2	2	2	2														

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019 serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menggambarkan tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi yang telah ditetapkan. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan maka perlu ditetapkan Indikator kinerja Utama (IKU) dengan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian, perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Misi 5 : Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif Guna Memacu Pertumbuhan Ekonomi Kota yang Berdaya Saing

Tujuan 3 : Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Merata

Sasaran 8 : Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut, yaitu:

Indikator 1: Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%)

Jumlah Produktivitas Tanaman Pangan pada tahun 2014 diprediksi untuk komoditi Padi 29,00 Kw/Ha, Ubi Kayu 125,03 Kw/Ha dan Keladi 193,4 Kw/Ha. Pada Tahun 2014 tidak ada perubahan yang signifikan dengan capaian produktivitas tahun sebelumnya.

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%)							
	- Padi	0,00	6,95	0,05	0,05	0,05	0,05	
	- Ubi Kayu	4,14	0,61	0,76	0,80	0,85	0,90	
	- Keladi	0,00	0,10	0,99	0,98	0,97	0,96	

Indikator 2: Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (%)

Jumlah Produktivitas Tanaman Hortikultura diprediksi pada tahun 2014 menunjukkan angka untuk komoditi sayuran (sawi, bayam, kangkung; 154,5; 75,50; 159,3 kw/ha), buah-buahan (pepaya) 887,50 kw/ha, biofarmaka (lidah buaya) 988 kw/ha. Diharapkan terdapat peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (%)							
	Sayuran (%)							
	- Sawi	0,26	2,65	2,77	3,07	3,45	4,37	
	- Bayam	11,69	11,72	11,74	11,78	11,82	11,88	
	- Kangkung	0,06	2,51	3,06	3,86	4,00	4,13	
	Buah-buahan (%)							
	- pepaya	0,02	0,06	0,11	0,17	0,20	0,25	
	Biofarmaka (%)							
	- lidah buaya	5,32	5,56	5,57	5,59	5,60	5,60	

Indikator 3: Persentase Peningkatan Jumlah Ketersediaan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASU (Aman Sehat Utuh) dan ASUH (Aman, Sehat Utuh & Halal) (%)

Jumlah produksi daging hewan Kota Pontianak tahun 2013 sebanyak 7.534.359 kg diperkirakan pada tahun 2014 sebesar 7.609.702 kg, dan diharapkan terdapat peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Persentase Peningkatan Jumlah Ketersediaan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASU (Aman Sehat Utuh) dan ASUH (Aman, Sehat Utuh & Halal) (%)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

Indikator 4: Persentase Penurunan Kasus Kejadian Penyakit Hewan dan Ternak (%)

Penurunan Jumlah Kasus Kejadian Penyakit Hewan dan Ternak di Kota Pontianak pada tahun 2014 diprediksikan 47 kasus, diharapkan terdapat penurunan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya, sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Penyakit Hewan dan Ternak (%)	0,00	2,13	2,17	2,22	2,27	2,33	

Indikator 5: Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis (%)

Kondisi angka Persentase Penurunan Luasan Lahan Kritis pada tahun 2014 menunjukkan 0.26% dengan kondisi tahun 2013 seluas 3.740,5 Ha dan tahun 2014 seluas 3.729,5 Ha. Diharapkan terjadi penurunan pada tahun-tahun berikutnya, sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Penurunan Luasan Lahan Kritis (%)	0,26	0,26	0,27	0,32	0,38	0,43

Indikator 6: Persentase Penurunan Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Hasil Hutan Illegal (%)

Kondisi Persentase Penurunan Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Hasil Hutan Illegal pada tahun 2014 menunjukkan angka 1,13% dengan kondisi tahun 2013 sejumlah 177 Pelaku Usaha dan tahun 2014 berjumlah 175 Pelaku Usaha. Diharapkan terjadi penurunan pada tahun-tahun berikutnya, sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Penurunan Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Hasil Hutan Illegal (%)	1,13	2,86	2,94	3,03	3,13	3,23

Indikator 7 : Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Hasil Budidaya (%)

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya pada tahun 2013 Lele, Mas dan Nila ; 354,42; 172,52; 371,18 ton, dan tahun 2014 diprediksi Lele, Mas dan Nila ; 372,14; 174,25; 378,60 ton diharapkan terdapat peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Hasil Budidaya (%)						
	- lele	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	- Mas	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	- Nila	2,00	2,94	5,00	5,00	5,00	5,00

Indikator 8 : Persentase Peningkatan Kepuasan Pengunjung UPTD Agribisnis (%)

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menargetkan nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dari tamu yang berkunjung di UPTD Agribisnis tahun 2014 mencapai 79,13.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Persentase Peningkatan Kepuasan Pengunjung UPTD Agribisnis (%)	(1,83)	1,85	1,94	1,95	2,03	2,11	

Indikator 9 : Persentase Peningkatan Retribusi UPTD RPH Sapi (%)

Jumlah Retribusi di UPTD RPH Sapi pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak Rp. 497.000.000,-. Diharapkan terdapat peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Persentase Peningkatan Retribusi di UPTD RPH Sapi (%)	0,00	(32,14)	5,89	5,56	5,25	5,00	

Indikator 10 : Persentase Peningkatan Retribusi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (%)

Jumlah Retribusi di UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada tahun 2014 diprediksikan senilai Rp. 35.280.000,-. Diharapkan terdapat peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, sebagaimana dimuat dalam tabel dibawah ini.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Persentase Peningkatan Retribusi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (%)	63,33	0,00	5,00	5,10	5,30	5,50	

TABEL VI. 1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA PONTIANAK

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	RUMUS	PENJELASAN
1.	Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%) -Padi -Keladi -Ubi Kayu	$\left[\frac{\left(\frac{\text{ProduksiTahun}(n)}{\text{LuasPanenTahun}(n)} \right) - \left(\frac{\text{ProduksiTahun}(n-1)}{\text{LuasPanenTahun}(n-1)} \right)}{\left(\frac{\text{ProduksiTahun}(n-1)}{\text{LuasPanenTahun}(n-1)} \right)} \right] \times 100\%$	Meningkatnya produktivitas pertanian akan membantu mewujudkan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pertanian dan kemandirian pangan di Kota Pontianak
		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (%) Sayuran - Sawi - Bayam - Kangkung Buah-buahan - Pepaya Biofarmaka - Lidah Buaya	$\left[\frac{\left(\frac{\text{ProduksiTahun}(n)}{\text{LuasPanenTahun}(n)} \right) - \left(\frac{\text{ProduksiTahun}(n-1)}{\text{LuasPanenTahun}(n-1)} \right)}{\left(\frac{\text{ProduksiTahun}(n-1)}{\text{LuasPanenTahun}(n-1)} \right)} \right] \times 100\%$	
2.	Meningkatkan Ketersediaan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASU (Aman Sehat Utuh) dan ASUH (Aman Sehat Utuh & Halal)	Persentase Peningkatan Ketersediaan Bahan Pangan Asal Hewan yang ASU (Aman Sehat Utuh) dan ASUH (Aman Sehat Utuh & Halal) (%)	$\left[\frac{(\text{KetersediaanTahun}(n)) - (\text{KetersediaanTahun}(n-1))}{(\text{KetersediaanTahun}(n-1))} \right] \times 100\%$	Meningkatnya ketersediaan bahan pangan hewani dan hasil olahan yang ASUH akan mewujudkan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha peternakan melalui peningkatan pendapatan serta meningkatnya nilai konsumsi bahan pangan hewani dan hasil olahan yang ASUH di Kota Pontianak

3.	Menurunkan Kasus Penyakit Hewan dan Ternak	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Penyakit Hewan dan Ternak (%)	$\left[\frac{(JumlahKasusTahun(n-1)) - (JumlahKasusTahun(n))}{JumlahKasusTahun(n-1)} \right] \times 100\%$	
4.	Menurunkan Luas Lahan Kritis	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis (%)	$\left[\frac{(luaslahankritisahun(n-1)) - (luaslahankritisahun(n))}{luaslahankritisahun(n-1)} \right] \times 100\%$	Menurunnya luas lahan kritis melalui penghijauan sebagai penghasil udara bersih bagi Kota Pontianak.
5.	Menurunkan Peredaran Hasil Hutan yang Illegal	Persentase Penurunan Pelaku Usaha yang memanfaatkan Hasil Hutan Illegal (%)	$\left[\frac{(JumlahPelakuTahun(n-1)) - (JumlahPelakuTahun(n))}{JumlahPelakuTahun(n-1)} \right] \times 100\%$	
6.	Meningkatkan Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Hasil Budidaya (%) -Ikan Lele -Ikan Mas -Ikan Nila -Ikan Lainnya	$\left[\frac{(produksitahun(n)) - (produksitahun(n-1))}{(produksitahun(n-1))} \right] \times 100\%$	Meningkatnya produksi ikan hasilbudidaya akan mewujudkan peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan melalui peningkatan pendapatan serta pemenuhan penyediaan ikan untuk konsumsi Kota Pontianak
7.	Mengoptimalkan Fungsi UPTD Agribisnis, RPH Sapi dan Pangkalan Pendaratan Ikan	Persentase Peningkatan Kepuasan Pengunjung UPTD Agribisnis (%)	$\left[\frac{(NilaiSKMTahun(n)) - (NilaiSKMTahun(n-1))}{(NilaiSKMTahun(n-1))} \right] \times 100\%$	Mengoptimalkan fungsi UPTD dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
		Persentase Peningkatan Retribusi UPTD RPH Sapi (%)	$\left[\frac{(JumlahRetribusiTahun(n)) - (JumlahRetribudiTahun(n-1))}{(JumlahRetribusiTahun(n-1))} \right] \times 100\%$	
		Persentase Peningkatan Retribusi UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (%)	$\left[\frac{(JumlahRetribusiTahun(n)) - (JumlahRetribudiTahun(n-1))}{(JumlahRetribusiTahun(n-1))} \right] \times 100\%$	

BAB VII PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kota Pontianak Tahun 2015 – 2019 mempunyai tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dalam melaksanakan seluruh kegiatannya akan mengacu kepada RENSTRA yang telah disusun bersama komponen dinas yang terkait. Konsekuensinya komitmen yang tinggi harus diberikan dalam tahap pelaksanaannya, baik oleh seluruh komponen Pemerintah Kota Pontianak maupun segenap lapisan masyarakat (petani, pihak swasta serta pihak lain yang terkait).

Dalam hal pelaksanaannya, distribusi wewenang dan tanggung jawab antara Pemerintah Kota, petani, masyarakat serta sektor pendukung lainnya benar-benar direalisasikan. Untuk itu masing-masing perlu memahami fungsi dan tanggung jawabnya sehingga dapat berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan/ ketersediaan pangan yang berkualitas baik di Kota Pontianak.

Guna mencapai hasil yang optimal, sangat diharapkan ada tindak lanjut dari rumusan RENSTRA ini. Apabila terdapat kegiatan yang pelaksanaannya belum berjalan optimal, padahal kegiatan tersebut erat kaitannya dengan misi pembangunan pangan dan kehutanan di Kota Pontianak yang seharusnya berjalan sesuai dengan rencana menjadi tidak terformulasikan dengan baik.

Untuk itu sekali lagi sangat dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh stake holder yang terkait, bahwa berhasilnya pembangunan pangan dan kehutanan di Kota Pontianak juga menuntut peran serta aktif dari berbagai pihak, serta Pemerintah Kota juga harus mampu memfasilitasi dan mengkoordinir seluruh proses yang ada dengan memberikan pelayanan yang kondusif. Jika kondisi ini dapat diciptakan, maka suatu sinergi yang ideal akan terbentuk yang pada akhirnya akan mempertinggi akselerasi Kota Pontianak.

WALIKOTA PONTIANAK



SUTARMIDJI

LAMPIRAN 1

KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN (DALAM ANGKA)
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA PONTIANAK

VISI : PELAKU USAHA PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN SEJAHTERA, KUALITAS PANGAN TERJAMIN DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN TERJAGA

MISI I : Mewujudkan Profesionalisme Aparatur yang Beretos Kerja Tinggi Menuju Pelayanan Publik yang Prima.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan Kapabilitas Aparatur dan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jangka Waktu Pelayanan SKPD (Tahun)	1	1	1	1	1
	Meningkatkan kapabilitas SDM Aparatur	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan (orang)	5	5	6	6	7
	Meningkatkan Pengelolaan Perencanaan Kerja dan Monitoring dan evaluasi serta Keuangan dan Aset secara tertib dan teratur	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan (Dokumen)	14	14	14	14	14
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan pengelolaan aset (Dokumen)	6	6	6	6	6

MISI II : Mewujudkan Ketersediaan Produksi dan Mutu Hasil Pertanian yang Berkelanjutan.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Pertanian	Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan					
		- Padi	31.02	31.03	31.05	31.06	31.08
		- Ubi Kayu	131.00	132.00	133.05	134.18	135.39
		- Keladi	195.33	197.26	199.19	201.12	203.05
		Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura					
		a. Sayuran					
		- Sawi	158.60	163.00	168.00	173.80	181.4
- Bayam	84.35	94.25	105.35	117.80	131.80		

		- Kangkung	163.30	168.30	174.80	181.80	189.30
		b. Buah-buahan					
		- Pepaya	888.00	889.00	890.50	892.30	894.50
		c. Biofarmaka					
		- Lidah Buaya	1042.9	1101.0	1162.6	1227.7	1296.5

MISI III: Mewujudkan Ketersediaan Bahan Pangan yang ASUH bagi Masyarakat dan Meningkatkan Kesehatan Hewan							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan Mutu Pangan Asal Hewan	Meningkatkan ketersediaan pangan hewani yang ASU (Aman, Sehat Utuh) dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Peningkatan ketersediaan pangan hewani yang ASU (Aman, Sehat Utuh) dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal)					
		- Daging Sapi	1,486,646.82	1,501,513.28	1,516,528.42	1,531,693.70	1,547,010.64
		- Daging Ayam	5,210,886.04	5,262,994.90	5,315,624.85	5,368,781.10	5,422,468.91
		- Daging Kambing	72,075.17	72,795.92	73,523.88	74,259.12	75,001.71
		- Daging Babi	867,144.17	875,815.61	884,573.76	893,419.50	902,353.70
	- Daging Itik	49,047.43	49,537.90	50,033.28	50,533.61	51,038.95	
	Menurunkan Kasus Penyakit Hewan dan Ternak	Jumlah Kasus Kejadian Penyakit Hewan dan Ternak	46	45	44	43	42

Misi IV. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan dan Tertib Administrasi Peredaran Hasil Hutan							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan Ketertiban Peredaran Hasil Hutan dan Kelestarian Lingkungan	Menurunkan Luas Lahan Kritis	Penurunan Luasan Lahan Kritis	3719.74	3709.74	3697.74	3683.74	3667.74
	Menurunkan Peredaran Hasil Hutan yang Illegal	Penurunan Pelaku Usaha yang memanfaatkan hasil hutan ilegal	170	165	160	155	150

Misi V : Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Hasil Perikanan Yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan kesejahteraan pelaku	Meningkatkan produksi hasil perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya					

usaha perikanan	- Ikan Lele	390.75	410.29	430.8	452.34	474.96
	- Ikan Mas	175.99	177.75	179.53	181.33	183.14
	- Ikan Nila	389.74	409.23	429.69	451.17	473.73

Misi VI : Menyelenggarakan Tata Kelola UPTD yang Profesional Guna Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan Pelayanan UPTD	Mengoptimalkan Fungsi UPTD Agribisnis, RPH Sapi dan Pangkalan Pendaratan Ikan	Nilai Kepuasan Pengunjung UPTD Agribisnis	80.60	82.16	83.76	85.46	87.26
		Peningkatan Retribusi di UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	35,280,000	37,044,000	38,933,244	40,996,705	43,251,524
		Peningkatan Retribusi di UPTD Rumah potong Hewan Sapi (RPH Sapi)	337,250,000	357,100,000	376,950,000	396,750,000	416,600,000

LAMPIRAN 2

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KOTA PONTIANAK

SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (%)					
	- Padi	6.95	0.05	0.05	0.05	0.05
	- Ubi Kayu	0.61	0.76	0.80	0.85	0.90
	- Keladi	1.00	0.99	0.98	0.97	0.96
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura (%)					
	a. Sayuran					
	- Sawi	2.65	2.77	3.07	3.45	4.37
	- Bayam	11.72	11.74	11.78	11.82	11.88
	- Kangkung	2.51	3.06	3.86	4.00	4.13
	b. Buah-buahan					
	- Pepaya	0.06	0.11	0.17	0.20	0.25
	c. Biofarmaka					
	- Lidah Buaya	5.56	5.57	5.59	5.60	5.60

Meningkatkan ketersediaan pangan hewani yang ASU (Aman, Sehat Utuh) dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Persentase peningkatan ketersediaan pangan hewani yang ASU (Aman, Sehat Utuh) dan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) (%)					
	- Daging Sapi	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	- Daging Ayam	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	- Daging Kambing	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	- Daging Babi	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	- Daging Itik	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Persentase Penurunan Kasus Kejadian Penyakit Hewan dan Ternak	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Penyakit Hewan dan Ternak (%)	2.13	2.17	2.22	2.27	2.33

Menurunkan Luas Lahan Kritis	Persentase Penurunan Luasan Lahan Kritis (%)	0.26	0.27	0.32	0.38	0.43
Menurunkan Peredaran Hasil Hutan yang Ilegal	Persentase Penurunan Pelaku Usaha yang memanfaatkan hasil hutan ilegal (%)	2.86	2.94	3.03	3.13	3.23
Meningkatkan Produksi Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)					
	- Ikan Lele	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	- Ikan Mas	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	- Ikan Nila	2.94	5.00	5.00	5.00	5.00
Mengoptimalkan Fungsi UPTD Agribisnis, RPH Sapi dan Pangkalan Pendaratan Ikan	Persentase Peningkatan Kepuasan Pengunjung (%)	1.85	1.94	1.95	2.03	2.11
	Persentase Peningkatan Retribusi di UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (%)	0.00	5.00	5.10	5.30	5.50
	Persentase Peningkatan Retribusi di UPTD Rumah potong Hewan Sapi (RPH Sapi) (%)	-32.14	5.89	5.56	5.25	5.00